

TABLOID Sinar Tani

TERBIT SETIAP HARI RABU
Harga Tabloid Cetak : Rp 16.000
E-paper : Rp 72.000/Tahun (48 edisi)

www.tabloidsinartani.com

Hotline/SMS : 081317575066
e-mail : redaksi@sinartani.co.id

www.sinartani.co.id

Edisi 22 - 28 Januari 2025

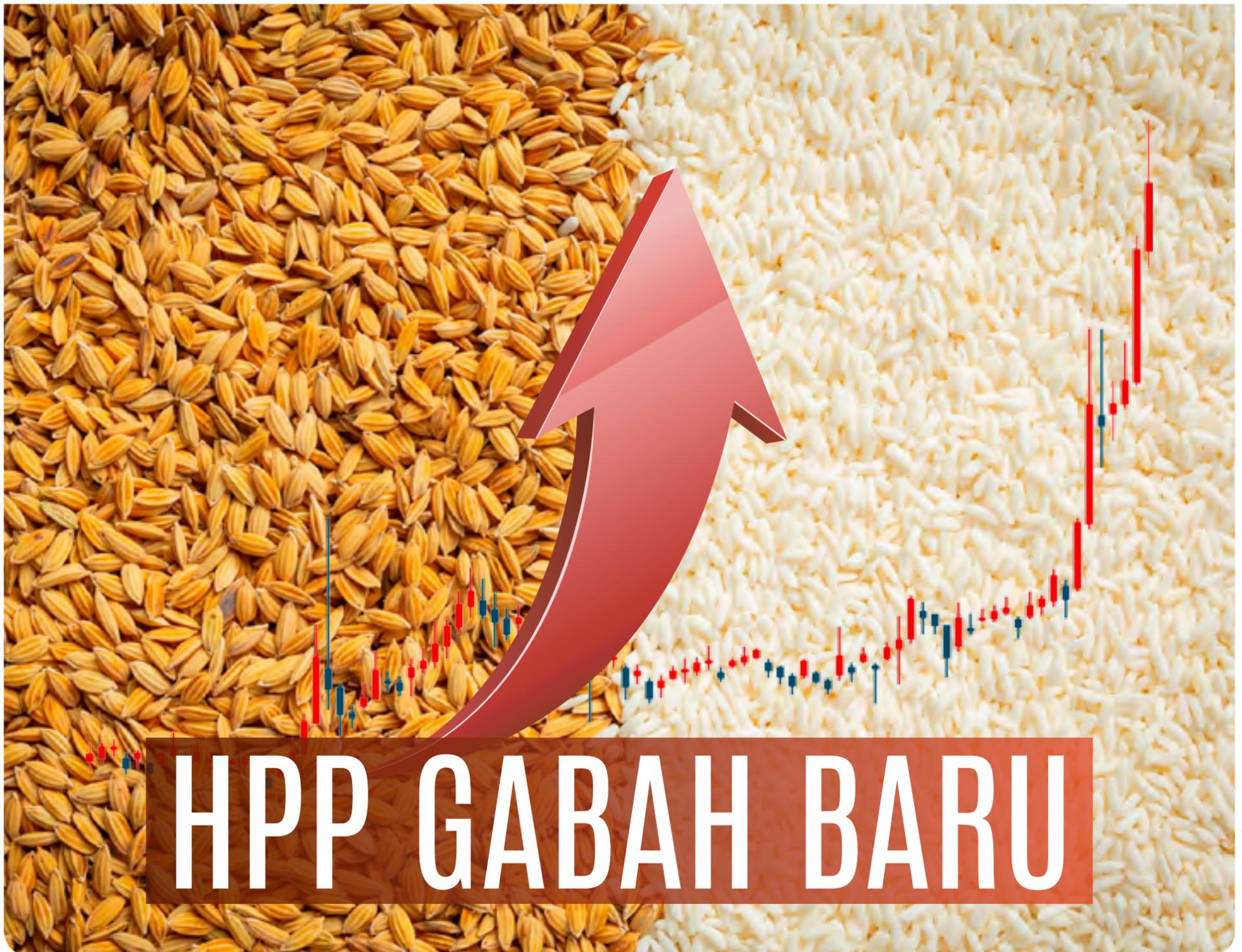
No. 4071
Tahun LV



10 Fitri Patmawati, Polisi yang Mengerti Bahasa Hewan

12 Ekspor Produk Turunan Sawit Ikuti Aturan Baru

13 Mengejar Produksi Jagung, Melirik Lahan Kering dan Kebun



www.sinartani.co.id

[tabloidsinartani.com](https://www.facebook.com/tabloidsinartani.com)

[@SinarTaniST](https://twitter.com/SinarTaniST)

[tabloidsinartani](https://www.instagram.com/tabloidsinartani)

[SINTA TV](https://www.youtube.com/SINTA_TV)

ADVANTA
JANGAN KHAWATIR BULAI (downy mildew) kalau masih Ada ADV JAGO Dan ADV MONTOK
ADVANTA JAGUNG HEBAT
©advantaseedsid ©Advanta Seeds Indonesia © Advanta Seeds Indonesia



EDITORIAL

Regulasi Baru di Tahun Baru

Pada awal Tahun 2025, pemerintah telah meluncurkan beberapa kebijakan terkait komoditas pertanian. Setidaknya ada dua kebijakan penting. Pertama, terkait harga gabah yang diterbitkan Badan Pangan Nasional. Kedua, regulasi ekspor produk turunan minyak sawit yang diterbitkan Kementerian Perdagangan.

Kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras ibarat menjadi kado bagi petani memasuki musim panen awal tahun 2025. Tema Sorotan ini diangkat Tabloid Sinar Tani ini karena memang menjadi informasi yang banyak ditunggu petani dan kalangan penyuluh pertanian. Pasalnya, di beberapa wilayah sentra pangan sudah memasuki musim panen, bahkan harga mulai turun.

Dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Kepbadan) No. 2 Tahun 2025 tanggal 12 Januari yang berlaku 15 Januari ini, pemerintah bukan hanya mengubah Harga Pembelian Pemerintah (HPP), tapi juga tetap memberlakukan kebijakan rafaksi harga gabah dan beras. Keputusan ini menjadi dasar bagi Perum Bulog untuk menyerap gabah petani.

Selain mengenai kebijakan HPP gabah/beras, regulasi baru pemerintah datang dari Kementerian Perdagangan mengumumkan perubahan penting dalam regulasi ekspor produk turunan minyak sawit dan residu melalui Permendag No. 2 Tahun 2025. Kebijakan tersebut berlaku mulai 8 Januari 2025 dengan fokus utama pada penguatan industri dalam negeri.

Permendag tersebut menjadi tonggak penting dalam regulasi ekspor produk turunan kelapa sawit, terutama dalam pengendalian ekspor limbah industri kelapa sawit seperti *Palm Oil Mill Effluent* (POME), *High Acid Palm Oil Residue* (HAPOR), dan *Used Cooking Oil* (UCO).

Dengan terbitnya peraturan ini diharapkan dapat memperketat pengawasan terhadap ekspor produk-produk tersebut, khususnya untuk mendukung industri dalam negeri, termasuk industri minyak goreng dan biodiesel.

Permendag No. 2 Tahun 2025 juga menjadi langkah strategis untuk memastikan ketersediaan bahan baku bagi industri minyak goreng dalam negeri dan mendukung program biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 40 persen (B40).

Selain regulasi baru di awal tahun baru, Tabloid Sinar Tani juga menyoroti Kementerian Pertanian yang menggandeng Polri dalam program tanam jagung serentak tahun 2025. Program tersebut akan menasar lahan perkebunan dan lahan kering di berbagai wilayah Indonesia.

Beberapa provinsi strategis seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Lampung, dan Jawa Tengah menjadi prioritas pelaksanaan. Pemerintah menargetkan total lahan yang akan ditanam mencapai 1,7 juta ha dengan produktivitas rata-rata 4 ton/ha. Dari luas tersebut, diharapkan 60% efektif ditanam dan menghasilkan tambahan produksi sebesar 4 juta ton jagung.

Selain mengenai Peternakan dan Agriprofil, serta Tani Sukses, ulasan mengenai HPP gabah/beras, regulasi baru dari Kementerian Perdagangan, serta rencana pemerintah menggarap lahan kering dan kebun untuk mendorong swasembada jagung menjadi berita utama Tabloid Sinar Tani minggu ini.

SAUNG TANI



Panen padi telah tiba

- Bulog wajib antisipasi

Laut di Tangerang dipagar

- Ada udang di balik pagar

Kasus sawit, Indonesia menang di WTO

- Alhamdulillah....

Desain Cover: Budi Putra K.
Foto Cover: Istimewa

Pemimpin Umum/Penanggung Jawab : Dr. Ir. Memed Gunawan; **Pemimpin Perusahaan :** Ir. Mulyono Machmur, MS; **Pemimpin Redaksi :** Yulianto; **Redaktur Pelaksana :** Yulianto; **Redaktur :** Gesha Yuliani, S.Pi; **Staff Redaksi :** Julian Ahmad; Nattasya; Indri Hapsari, S. Sos; Echa; Herman Rafi; **Koresponden :** Wasis (Cilacap), Soleman (Jatim), Suriady (Sulsel), Abdul Azis (Aceh), Suroyo (Banten), Gultom (Sumut), Nsd (Papua Barat); **Layoutman :** Suhendra, Budi Putra Kharisma; **Korektor/Setter:** Asrori, Hamdani; **Sekretariat Redaksi:** Hamdani; **Pengembangan Bisnis :** Dewi Ratnawati; Indri; Echa Sinaga; **Keuangan:** Katijo, SE (Manajer); Ahmad Asrori; **Sekretariat Perusahaan :** Suparjan; Jamhari; Awan; **Distribusi:** Saptyan Edi Kurniawan, S.AP; Dani; Jamhari

Penerbit: PT. Duta Karya Swasta; Komisaris: DR. Ir. A. H. Rahadian, M.Si; Ir. Achmad Saubari Prasodjo
Direktur Utama: DR. Ir. Memed Gunawan; **Direktur:** Ir. Mulyono Machmur, MS

Alamat Redaksi dan Pemasaran/Iklan: Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta 12550, Telp. (021) 7812162-63, 7817544 Fax: (021) 7818205
Email: redaksi@sinartani.co.id; **Izin Terbit** No. 208/SK/Menper/SIUPP/B.2/1986; Anggota SPS No. 58/1970/11B/2002; **Izin Cetak:** Laksus Pangkopkamtibda Jaya No. Kep. 023/PK/IC/7; **Harga:** Rp. 16.000 per edisi; **Tarif Iklan: FC** Rp. 8000/mmk, **BW** Rp. 7.000/mmk; **Pembayaran:** Bank Mandiri Cab. Ragunan No. 127.0096.016.413, BNI 46 Cab. Dukuh Bawah Jakarta No. 14471522, Bank Agro Kantor Pusat No. 01.00457.503.1.9 a/n Surat Kabar Sinar Tani. Bank BRI Cabang Pasar Minggu: a/n PT. Duta Karya Swasta No. 0339.01.000419.30.1; **ISSN:** 0852-8586; **Percetakan:** PT. Aliansi Temprina Nyata Grafika

PINDAI BARCODE!
Untuk Mengakses e-paper Sinartani.Andi Amran Sulaiman
Menteri Pertanian RISerapan
Gabah
Jangan
Bermasalah

Petani saat ini tengah bersiap menyambut panen raya padi. Karena itu saya menekankan agar panen diantisipasi jangan sampai harga gabah di petani jatuh. Target swasembada bisa bermasalah apabila Bulog tidak mampu melakukan penyerapan gabah petani secara maksimal, yaitu dengan ketentuan harga HPP sebesar Rp6.500/kg.

Yang paling penting adalah serap gabah sebagai kunci untuk swasembada. Kenapa? Karena serap gabah bermasalah, target swasembada juga akan terancam. Misalnya, saat kami berkunjung ke Bantul bersama Komisi IV DPR RI, pembelian gabah hanya sebesar Rp5.500/kg. Ini bisa menyebabkan kerugian besar karena terdapat selisih sebesar Rp1.000/kg. Artinya apa? Kalau selama 4 bulan ini panen puncak harganya dibawah HPP, ini bisa berdampak pada kerugian.

Selain itu, anggaran sektor pangan yang diberikan negara untuk membantu petani bisa habis dengan sia-sia. Karena itu, jalan satu-satunya yang harus dilakukan saat ini adalah melakukan penyerapan secara maksimal.

Bapak Presiden telah memberikan kebijakan luar biasa yang pro-petani dan sangat peduli pada kesejahteraan mereka. Mulai dari penambahan alokasi pupuk hingga dua kali lipat, perbaikan irigasi, distribusi alat mesin pertanian (alsintan), benih unggul, hingga penyesuaian harga gabah dan jagung.

Harga gabah kini dinaikkan dari Rp 6.000 menjadi Rp 6.500, sedangkan harga jagung dari Rp 5.000 menjadi Rp 5.500. Presiden telah memberi instruksi tegas agar hasil panen petani tidak boleh merugi dan harus diserap oleh BULOG.

Bapak Presiden mengatakan, tidak boleh petani dirugikan. Gabah hasil petani wajib diserap oleh BULOG. Dengan langkah-langkah strategis ini, kami optimis produksi pangan nasional akan meningkat signifikan.

Anggaran APBN yang sebesar kurang lebih Rp 145 triliun itu akan sia-sia apabila harga gabah di petani hanya Rp 5.500/kg. Karenanya peran Bulog sangat strategis. Bulog harus kerja keras untuk menyerap gabah petani karena ini adalah perintah Bapak Presiden yang tidak bisa ditawar. Wajib diserap selama gabah ada dan tidak boleh dibawah Rp 6.500/kg.

Sejauh ini pemerintah telah memberi berbagai bantuan dan fasilitas sarana prasarana produksi yang cukup masif. Diantaranya adalah kenaikan volume pupuk yang mencapai 9,5 juta ton dan juga bantuan benih serta normalisasi irigasi yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Alhamdulillah sekarang ini irigasi selesai, traktor, benih, pengolahan tanah, pupuk juga sudah diberesin. Jadi tinggal serap gabah yang perlu dilakukan.

Inovasi Agribisnis Lada, Ketika Raja Rempah Menjadi Devisa Unggulan

Lada, si Raja Rempah, tak hanya bumbu dapur, tapi juga penyumbang devisa unggulan! Inovasi agribisnis dari varietas unggul hingga teknologi modern jadi kunci kejayaan lada Indonesia di pasar global.



Lada, yang dikenal sebagai "King of Spice" atau rajanya rempah-rempah, merupakan salah satu komoditas tertua dan terpenting dalam sejarah perdagangan dunia. Selain menjadi bumbu andalan di dapur, lada memiliki peran besar dalam industri modern.

Bahan ini digunakan sebagai bahan baku untuk makanan siap saji, obat-obatan, kosmetik, hingga parfum. Tidak heran, devisa yang dihasilkan dari perdagangan lada menempati posisi keempat setelah minyak sawit (CPO), karet, dan kopi.

Dengan meningkatnya

permintaan lada di pasar global, perhatian terhadap kualitas, keamanan pangan, dan kebersihan produk ini semakin besar. Negara-negara industri kini memberlakukan aturan ketat dan pengawasan menyeluruh terhadap ekspor lada.

Hanya produk lada yang memenuhi standar aman, sehat, serta memiliki daya saing tinggi, terutama dari segi kualitas dan harga, yang mampu bertahan dan meraih pasar internasional. Sebaliknya, negara produsen yang tidak berinovasi dalam meningkatkan kualitas produksinya berisiko kehilangan kesempatan untuk memasok lada ke negara-negara pengimpor.

Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas dan mutu lada menjadi langkah penting yang harus dilakukan agar komoditas ini tetap menjadi primadona di pasar global sekaligus mendukung kontribusinya sebagai devisa unggulan.

Inovasi Agribisnis

Dalam rangka meningkatkan daya saing lada Indonesia, diperlukan inovasi agribisnis yang mencakup berbagai aspek:

a. Inovasi Varietas Unggul Baru

Penggunaan benih unggul atau bersertifikat menjadi langkah penting untuk mendukung peningkatan produksi dan daya saing lada. Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Balitro) telah mengembangkan benih lada varietas unggul seperti Petaling 1, Petaling 2, Lampung Daun Kecil (LDL), Chunuk, Natar 1, Natar 2, dan Bengkayang, yang memiliki potensi produksi tinggi serta ketahanan terhadap organisme pengganggu tanaman (OPT).

Varietas unggul lokal seperti Malonan dan Ciinten juga telah dikembangkan. Penyediaan benih unggul ini harus memenuhi prinsip 4T (tepat waktu, tepat tempat, tepat harga, dan tepat jenis) agar petani terdorong untuk menggunakannya.

Industri benih lada yang layak secara teknis dan ekonomis juga perlu dikembangkan. Dengan varietas unggul dan penerapan SOP budidaya yang benar, target produktivitas lada nasional dapat tercapai.

b. Inovasi Teknologi Pemupukan

Tanaman lada sangat responsif terhadap pemupukan. Inovasi teknologi pemupukan terpadu yang menggabungkan pupuk organik dan anorganik sesuai prinsip 5T (tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat cara) perlu diterapkan.

Anjuran penggunaan pupuk anorganik seperti NPK 15:15:15

dengan dosis 1,8 kg/pohon menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan produktivitas.

c. Inovasi Teknologi Budidaya

Sistem budidaya lada yang baik dilakukan dengan menerapkan GAP (Good Agriculture Practice), seperti penggunaan varietas unggul yang sehat dan tahan hama, pemanfaatan pupuk organik, pestisida nabati, dan agensia hayati. Langkah ini dapat menghasilkan lada berkualitas tinggi.

d. Inovasi Pengolahan Hasil

Untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional, perlu dilakukan penanganan pascapanen (Good Handling Practice/GHP) dan pengolahan (Good Manufacture Practice/GMP) sesuai standar mutu nasional (SNI) maupun internasional (ISO, ASTA, ESA).

Diversifikasi produk juga penting, seperti pengembangan lada hijau, oleoresin, minyak lada, parfum lada, dan produk lain yang memanfaatkan lada sebagai flavor.

e. Inovasi Pemasaran

Hambatan pemasaran di daerah produsen utama lada, seperti Bangka-Belitung dan Lampung, harus diminimalisir dengan meningkatkan efisiensi tata niaga, transparansi harga, dan promosi.

Peningkatan informasi pasar melalui media elektronik dan cetak, promosi produk secara nasional maupun internasional, serta komersialisasi indikasi geografis menjadi langkah penting.

f. Inovasi Kelembagaan

Memperkuat posisi tawar petani dapat dilakukan melalui kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi, atau asosiasi petani. Kelembagaan ini memungkinkan petani untuk belajar dan berinovasi bersama demi kemajuan agribisnis lada di masa depan.

Dengan penerapan inovasi-inovasi ini, diharapkan lada Indonesia mampu mempertahankan posisinya sebagai komoditas unggulan sekaligus meningkatkan daya saingnya di pasar global.

Penulis : Mugi Lestari

(Pusat Penyuluhan Pertanian BPPSDMP Kementan)



Bagaimana Kondisi Minyak Sawit 2025 ?

Pasar minyak sawit diperkirakan akan tetap kuat pada tahun 2025, menyusul kinerjanya yang lebih baik dibandingkan minyak nabati pesaingnya pada tahun 2024. Hal ini dipicu terus meningkatnya pencampuran biodiesel, tarif yang lebih tinggi, dan tingginya permintaan yang berkelanjutan, sementara produksi tetap stagnan.

Menurut perkiraan 12 lembaga industri dan pemerintah yang disurvei oleh S&P Global Commodity Insights, harga minyak sawit mentah berjangka di bursa komoditas Malaysia diperkirakan rata-rata sebesar MR 4,222.7/MT (942.77 dollar AS) pada tahun 2025, naik 4.5% dari tahun sebelumnya.

Kontrak minyak sawit, yang mempengaruhi harga minyak nabati internasional, rata-rata mencapai MR 4,041.9/MT pada tahun 2024. Sebagian besar sejalan dengan survei harga minyak sawit tahunan Commodity Insights sebesar MR 4,000/MT pada 22

Desember 2023.

Di pasar fisik, harga minyak sawit mentah FOB Indonesia rata-rata 995 dollar AS/MT pada tahun 2024, lebih tinggi dibandingkan harga rata-rata minyak kedelai FOB Argentina sebesar 929 dollar AS/MT dan minyak bunga matahari FOB Laut Hitam sebesar 931 dollar AS/MT pada tahun tersebut.

Menurut analisis, tingkat stok yang lebih rendah di kedua produsen utama serta kenaikan pungutan ekspor Indonesia dan peningkatan konsumsi domestik untuk mandat biodiesel, kemungkinan akan mendukung harga minyak sawit pada tahun 2025. Produksi minyak sawit kemungkinan akan mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2025. Bahkan sebagian besar analisis memperkirakan adanya sedikit peningkatan dalam hasil panen karena kondisi cuaca yang mendukung.

Menurut laporan Departemen Pertanian AS

pada Desember, produksi minyak sawit global diperkirakan mencapai 80,34 juta MT pada tahun 2024-25, naik sedikit dari 79,83 juta MT pada tahun 2023-2024. Sedangkan produksi Indonesia diperkirakan akan sedikit meningkat pada tahun 2024-2025 menjadi 47 juta MT dari 46,5 juta MT, sementara produksi Malaysia juga mungkin mengalami sedikit peningkatan menjadi 19,8 juta MT.

Dalam jangka pendek, kombinasi Tahun Baru Imlek dan Ramadhan serta tingginya permintaan di musim panas dari India akan menjaga permintaan minyak sawit tetap tinggi pada paruh pertama tahun 2025. Departemen Pertanian AS memperkirakan pembeli terbesar India dan Tiongkok akan meningkatkan pembelian pada tahun 2025, karena kondisi makro ekonomi yang lebih baik mendorong laju perdagangan. **Sumber : S&P Global**

HPP Gabah Baru



Jelang panen raya yang diprediksi terjadi Februari-Maret 2025, pemerintah memberikan kado istimewa bagi petani. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras naik.

Setelah sempat menggadag-gadag kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras, akhirnya pemerintah menerbitkan surat keputusan. Surat Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras terbit 12 Januari 2025.

Surat keputusan yang mulai berlaku 15 Januari 2025 tersebut merupakan perubahan dari Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

Dalam keputusan tersebut harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani naik dari sebelumnya Rp 6.000 menjadi Rp 6.500/kg, harga gabah kering giling (GKG) di gudang Bulog naik dari Rp 7.400 menjadi Rp 8.000/kg. Sedangkan harga beras di gudang Bulog juga naik dari Rp 11.000 menjadi Rp 12.000/kg. Pemerintah juga masih menetapkan rafaksi dalam pembelian gabah/beras sebagai acuan bagi Bulog untuk pengadaan dalam negeri.

Sinyal kenaikan harga gabah sebelumnya dilontarkan Menteri Koordinasi Pangan, Zulkifli Hasan usai Rakor Pangan di Jakarta, Senin (6/1). Sinyal tersebut diungkapkan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman dalam beberapa kali kesempatan, salah satunya setelah mengikuti Rapat Terbatas tentang swasembada pangan di Istana Negara, Senin (30/12).

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah akan mengumumkan mulai 15 Januari 2025, harga gabah kering panen (GKP) dinaikkan

menjadi Rp 6.500/kg dari sebelumnya Rp 6.000/kg. Sedangkan harga pembelian beras di gudang Bulog sebesar Rp 12.000/kg.

Keputusan ini sudah dipastikan, dan Bulog akan membeli gabah langsung dari petani dengan harga tersebut. Bahkan pemerintah berharap kebijakan ini dapat meningkatkan daya serap gabah petani tanpa merugikan pihak manapun.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menjelaskan, penyesuaian kebijakan HPP untuk gabah, beras, dan jagung bertujuan agar hasil produksi petani dapat terserap dengan baik oleh Perum Bulog, sebagai upaya pemerintah untuk menyejahterakan petani dan meningkatkan produktivitas pertanian.

"Penyesuaian ini diharapkan bisa membantu meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendorong produktivitas pertanian dalam negeri," ujar Arief seraya menambahkan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto sebagai komitmen pemerintah dalam menciptakan ketahanan pangan dan swasembada pangan.

Monitoring Titik Panen

Menyambut musim panen, Perum Bulog siap melakukan penyerapan mulai dari titik-titik yang sudah panen terlebih dahulu di beberapa daerah. Bahkan Bulog sudah mempersiapkan beberapa strategi untuk penyerapan gabah/beras petani dalam negeri.

Selain optimalisasi infrastruktur seperti Sentra Pengolahan Padi dan Sentra Pengolahan Beras yang tersebar di seluruh Indonesia, Bulog berkoordinasi dengan Dinas Pertanian di tiap wilayah kerja untuk memonitoring titik panen dan berkoordinasi dengan mitra kerja pengadaan untuk optimalisasi penyerapan di tiap lini.

Mokhammad Suyamto, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog mengatakan, pihaknya akan melibatkan stakeholders untuk monitoring beberapa titik panen, terutama menjelang panen raya yang diperkirakan pada Februari. "Tim kami di lapangan sudah mempunyai data prakiraan panen sesuai KSA BPS dan data luas realisasi

tanam dari Dinas Pertanian dan terus memantau perkembangan tanam," kata Suyamto.

Selain itu lanjutnya, pihaknya juga sudah menyiapkan titik titik pembelian gabah petani dengan menggunakan sarana pengolahan sendiri maupun bekerja dengan mitra penggilingan. Pada tahun ini Perum Bulog menargetkan penyerapan sebanyak 3 juta ton setara beras. Untuk itu, kata Suyamto, pihaknya telah membentuk Tim Jemput Gabah agar penyerapan gabah lebih masif dan optimal sesuai ketentuan/spesifikasi yang berlaku.

"Periode sekarangpun kami masih melakukan penyerapan dengan mengacu pada HPP yang telah ditentukan sebelumnya. Kami berupaya untuk memenuhi target penyerapan sebagai bentuk komitmen dalam mendukung program pemerintah, tentunya

dibutuhkan koordinasi yang baik bagi tiap stakeholders kami di seluruh wilayah kerja Bulog," tutur Suyamto.

Untuk mencegah harga gabah jatuh, Bulog bersama stakeholders seperti Dinas Pertanian dan Gapoktan akan melakukan pengecekan dan monitoring titik-titik panen yang sudah berjalan. "Tentunya kami akan melakukan penyerapan sesuai dengan peraturan dan ketentuan pemerintah yang berlaku," katanya.

Sepanjang Tahun 2024, realisasi pengadaan Perum Bulog mencapai 1,266 juta ton. Gapaian 2024 ini menjadi yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Pada 2020 Bulog total menyerap 1,256 juta ton. Pada 2021, di angka 1,216 juta ton. Berlanjut di 2022 Bulog menyerap 994 ribu ton dan di 2023 berada di angka 1,066 juta ton. Bagaimana pengadaan tahun ini dengan HPP baru? **Yul**

Tabel Harga Pembelian Gabah

| No | Gabah | Kadar Air (%) | Kadar Hampa (%) | HPP (Rp/kg) |
|----|---|---------------|-----------------|-------------|
| 1 | Gabah Kering Panen (GKP) di Petani | Maks 25 | Maks 10 | 6.500 |
| 2 | Gabah Kering Panen (GKP) di Penggilingan | Maks 25 | Maks 10 | 6.700 |
| 3 | Gabah Kering Giling (GKG) di Penggilingan | Maks 14 | Maks 3 | 8.000 |
| 4 | Gabah Kering Giling (GKG) di gudang Perum BULOG | Maks 14 | Maks 3 | 8.200 |

Tabel Harga Pembelian Beras

| Beras | Derajat Sosoh (Min) | Kadar Air (Maks) | Butir Patah (Maks) | Butir Menir (Maks) | HPP (Rp/kg) |
|-----------------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Beras di gudang Perum BULOG | 100 | 14 | 25 | 2 | 12.000 |

Keterangan:

- Kadar air adalah jumlah kandungan air di dalam butir Gabah atau Beras yang dinyatakan dalam satuan persen berat basah (wet basis).
- Kadar hampa adalah gabah yang tidak terisi dan/atau kotoran.
- Derajat sosoh adalah tingkat terlepasnya lapisan pericarp, testa, dan aleuron serta lembaga dari butir Beras.
- Butir patah adalah butir Beras dengan ukuran lebih besar dari 0,2 (nol koma dua) sampai dengan lebih kecil dari 0,8 (nol koma delapan) bagian dari butir Beras utuh.
- Butir menir adalah butir Beras dengan ukuran lebih kecil dari 0,2 (nol koma dua) bagian butir Beras utuh.

Implikasi HPP Gabah terhadap Petani

Pemerintah telah mengetok palu kenaikan harga gabah dan beras dengan terbitnya Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Kepbadan) No. 2 Tahun 2025 tanggal 12 Januari 2025 tentang Perubahan Atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. Dengan keputusan tersebut, Bulog akan melaksanakan penyerapan gabah dan beras produksi dalam negeri sepanjang tahun 2025.

Kepala NFA Arief Prasetyo Adi di Jakarta pada Senin (13/1) mengatakan, keputusan tersebut sebagai tindak lanjut Rapat Terbatas bersama Presiden Prabowo 30 Desember lalu dan Rakortas dengan Menko Pangan 6 Januari. "Tentunya keputusan ini untuk melindungi pendapatan petani Indonesia, kami bersama-sama Bulog akan memulai penyerapan mulai 15 Januari ini dengan HPP yang telah disesuaikan," katanya.

Jika dicermati, sejak NFA mengatur penetapan kebijakan HPP gabah dan beras untuk Bulog mulai Maret 2023, turut berimplikasi pada perubahan positif Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP). Seterusnya indeks NTPP tidak pernah kurang dari NTPP Maret 2023 yang kala itu masih berada di angka 103,83.

Dampak tersebut menandakan kebijakan penetapan HPP dari pemerintah cukup efektif dalam memberi perlindungan petani agar semangat bertanam dan meningkatkan produktivitas. "Terlebih di 2025 ini, perkiraan waktu panen raya padi akan mengalami kemajuan dan pemerintah sangat optimis dapat mewujudkan akselerasi produksi beras," ujarnya.

Arief mengatakan, evaluasi perubahan HPP gabah dan beras memang perlu dilakukan secara berkala. Perhitungannya pun telah mempertimbangkan perkembangan struktur biaya produksi dan distribusi dengan kondisi saat ini. "Penyesuaian tersebut dapat dituangkan dalam suatu Keputusan seperti yang telah diatur dalam Perbadan Nomor 4 Tahun 2024," katanya.

Standar Kualitas Gabah

Dalam penyerapan gabah oleh Bulog nanti, Arief menitikberatkan kadar air gabah dan beras bersifat mutlak. Karena itu, kadar air harus dipastikan sesuai standar yang telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan fasilitas mesin dryer (pengering) supaya kualitas beras yang dikelola Bulog dapat selalu terjaga.

Sebagaimana diketahui, melalui Kepbadan No. 2 Tahun 2025, HPP gabah dan beras telah disesuaikan. Untuk Gabah Kering Panen (GKP) di petani sebesar Rp 6.500/kg dengan kualitas kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen. Sedangkan, GKP di penggilingan

sebesar Rp 6.700/kg dengan kualitas kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen.

Sementara harga Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan sebesar Rp 8.000/kg dengan kualitas kadar air maksimal 14 persen dan kadar hampa maksimal 3 persen. Adapun, GKG di gudang Bulog sebesar Rp 8.200/kg dengan kualitas kadar air maksimal 14 persen dan kadar hampa maksimal 3 persen.

Untuk harga beras, pemerintah juga menetapkan harga di gudang Bulog sebesar Rp 12.000/kg dengan kualitas derajat sosoh minimal 100

Tabel Rafaksi Harga Gabah

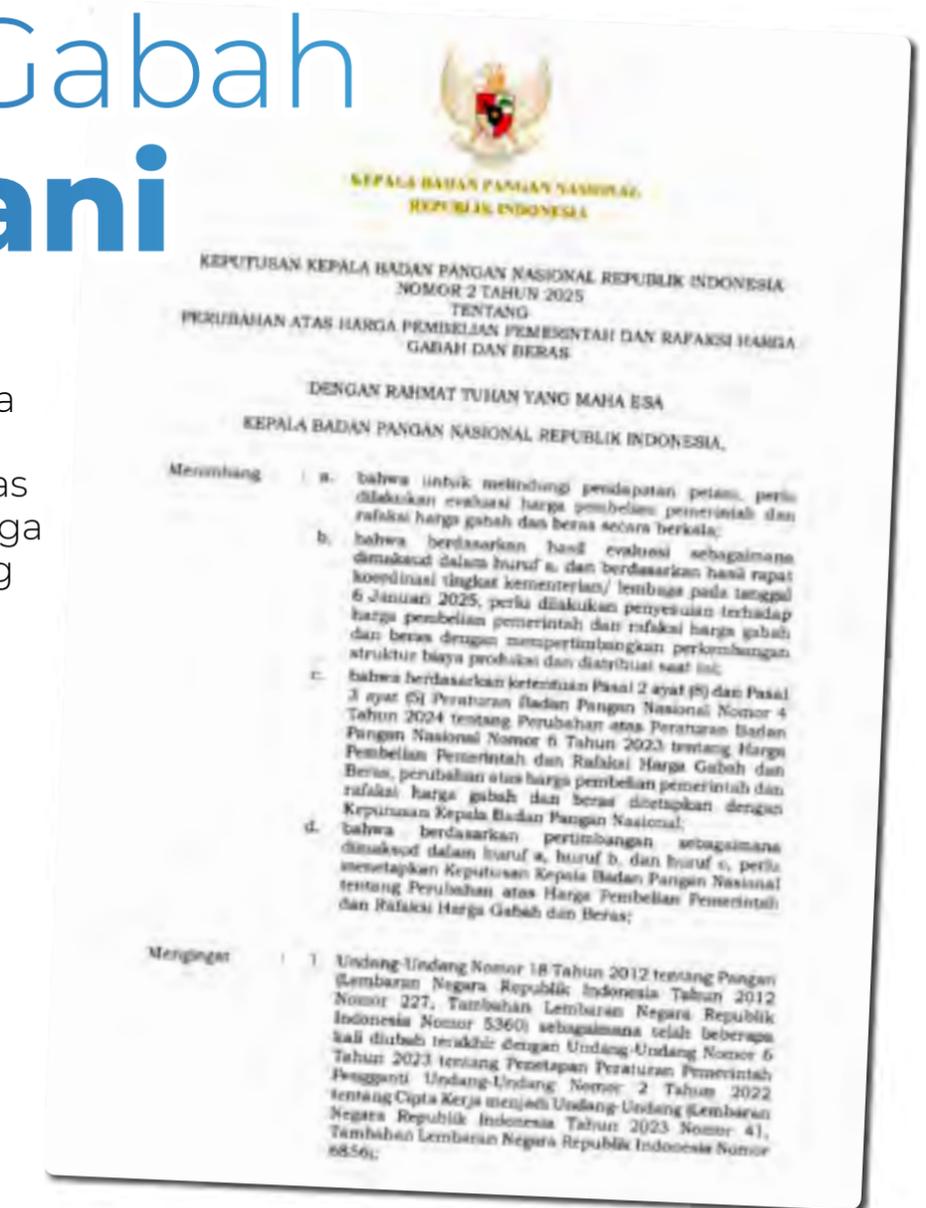
| No | Gabah | Kadar Air (%) | Kadar Hampa (%) | Rafaksi Harga (Rp/kg) | HPP (Rp/kg) |
|----------|---|----------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| A | Gabah Kering Panen (GKP) di Petani | Maks 25 | Maks 10 | -- | 6.500 |
| 1 | GKP diluar kualitas 1 (GLK-1) di Petani | Maks 25 | 11-15 | 300 | 6.200 |
| 2 | GKP diluar kualitas 2 (GLK-1) di Petani | 26-30 | Maks 10 | 425 | 6.075 |
| 3 | GKP diluar kualitas 1 (GLK-1) di Petani | 25-30 | 11-15 | 750 | 5.750 |
| B | Gabah Kering Panen (GKP) di Penggilingan | Maks 25 | Maks 10 | -- | 6.700 |
| 1 | GKP diluar kualitas 1 (GLK-1) di Penggilingan | Maks 25 | 11-15 | 300 | 6.400 |
| 2 | GKP diluar kualitas 2 (GLK-1) di Penggilingan | 26-30 | Maks 10 | 425 | 6.275 |
| 3 | GKP diluar kualitas 3 (GLK-1) di Penggilingan | 26-30 | 11-15 | 750 | 5.950 |

persen, kadar air maksimal 14 persen, butir patah maksimal 25 persen, dan butir menir maksimal 2 persen

"Kenapa derajat sosohnya dari sebelumnya 95 persen dinaikkan menjadi 100 persen? Karena pada saat penyaluran beras Bulog, kita ingin masyarakat menerima kualitas beras yang baik, tentunya putih, tidak kusam, dan juga tentu agar penggilingan padi naik kelas," tuturnya.

Namun demikian, Arief menegaskan, untuk gabah yang kualitasnya di luar ketentuan yang telah pemerintah tetapkan, pihaknya memberikan kebijakan rafaksi harga agar Bulog masih dapat menyerap. Penyesuaian HPP gabah dan beras yang diatur dalam Kepbadan ini telah sesuai dengan pasal 3 ayat 5 Perbadan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perbadan Nomor 6 Tahun 2023 tentang HPP dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

Dalam beleid tahun sebelumnya itu, jika terdapat perubahan atas HPP dan rafaksi harga gabah dan beras, ditetapkan dengan



Kepbadan. "Dengan ketetapan ini, kami harapkan Bulog dapat segera bersiap mengakselerasi penyerapannya agar sedulur petani kita terus termotivasi berproduksi dan stok beras aman dan terkendali," tegas Arief.

Meski pemerintah telah menetapkan kenaikan HPP gabah dan beras, Arief mengatakan, untuk HET (Harga Eceran Tertinggi) beras, masih menggunakan aturan sebelumnya dan tidak ada perubahan.

Ajak PERPADI

Sementara itu saat Munas Perkumpulan Pengusaha Penggilingan Padi dan Pedagang Beras Indonesia (Perpadi) di Solo, Rabu (15/1), Arief juga mengajak Perpadi bergotong royong membantu penyerapan produksi dalam negeri. Hal ini supaya kalangan petani padi Indonesia bisa terjaga spirit dan kesejahteraannya.

"Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, pemerintah itu harus memperhatikan petani pangan

domestik. Jadi setelah ini, mari kita bersama-sama dengan Bulog melakukan penyerapan. Apalagi nanti di Maret-April, gabah yang akan dipanen bisa sekitar 13-14 juta ton. Jadi semua penggilingan padi, mari sama-sama kita kawal penyerapan," sambungnya.

Arief mengungkapkan, pemerintah telah menargetkan Bulog bisa menyerap sekitar 2,5 sampai 3 juta ton setara beras, baik dalam bentuk GKP yang setara beras 600 ribu ton, GKG setara beras 900 ribu ton, kemudian 1,5 juta ton dalam bentuk beras di seluruh Indonesia.

"Tentu kita inginkan Bulog dan Perpadi bisa jadi pilar penyerapan hasil panen petani kita," ucap Arief. "Salah satu kunci kesuksesan kita nanti saat panen raya adalah kesinambungan mulai dari on-farm, kemudian off-farm saat pascapanen. Jadi petani itu nandur bisa semangat, karena gabahnya dibeli dengan harga baik. Tentunya ada spesifikasi gabah bagi Bulog di Rp 6.500 per kilo dengan kondisi tertentu," tambah Arief. **Yul**

Asa di Tahun Baru

Kenaikan HPP gabah pada awal tahun baru dan menjelang musim panen memberikan asa baru bagi petani. Berikut ini wawancara Tabloid Sinar Tani dengan Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Barat, Otong Wiranta dan Penyuluh Pertanian Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang, Efki Sugriawan.

Ketua KTNA Jawa Barat, Otong Wiranta: HPP Bisa Dirasakan Petani

Pemerintah resmi menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Kepbadan) Nomor 2 Tahun 2025 pada 12 Januari 2025. Kebijakan tersebut mengatur perubahan harga pembelian pemerintah (HPP) dan rafaksi harga gabah dan beras.

Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Barat, Otong Wiranta, mengapresiasi langkah pemerintah yang menaikkan HPP gabah menjadi Rp 6.500/kg. Menurutnya, kebijakan ini memberikan perlindungan harga yang sangat dibutuhkan oleh petani.

"Kenaikan HPP ini tentu kabar baik bagi kami petani. Dengan adanya jaminan harga di atas HPP, kami merasa lebih aman karena harga tidak akan jatuh terlalu rendah, terutama saat panen raya," ujar Otong.

Namun, ia mengakui, selama ini dampak HPP belum sepenuhnya petani merasakan, khususnya di daerahnya. Pasalnya, harga gabah kering panen (GKP) di lapangan saat ini sudah berada di kisaran Rp 7.000/kg.

"Harga gabah sedang tinggi karena belum memasuki panen raya. Tetapi kami yakin kebijakan ini sangat berguna saat panen raya tiba, ketika harga seringkali anjlok, apalagi di musim hujan," katanya. Karena itu, ia berharap pemerintah dapat benar-benar hadir di lapangan untuk mengimplementasikan HPP ini secara nyata, terutama saat harga

gabah menurun drastis.

Saat ini, tanaman padi di Jawa Barat berada pada fase pertumbuhan dengan rata-rata usia 30-50 hari. Panen diperkirakan akan dimulai pada Maret. Produktivitas di daerah sentra Pantura mencapai 6,5-7 ton/ha, bahkan beberapa lahan mampu menghasilkan hingga 8-9 ton/ha.

Otong mengungkapkan, sebelumnya ada usulan membagi HPP berdasarkan zonasi wilayah. Misalnya, di daerah sentra produksi seperti Pantura Jawa Barat, harga gabah biasanya lebih tinggi karena kualitas hasil panen dan biaya produksi yang juga lebih besar.



Apalagi biaya lain seperti sewa lahan, intensitas budidaya dan kebutuhan peralatan seperti dryer jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain.

Ia berharap kebijakan zonasi ini dapat memberikan keadilan bagi petani di daerah sentra produksi. "Kami berharap kebijakan HPP ini bisa benar-benar membantu petani saat harga jatuh. Dengan adanya zonasi, petani di daerah sentra bisa tetap mendapatkan perlindungan yang memadai," pungkas Otong. **Herman/Yul**

Penyuluh Pertanian, Efki Sugriawan: Imbangi dengan Pengendalian Harga Saprodi

Pemerintah resmi menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dari Rp 6.000 menjadi Rp 6.500/kg. Kebijakan ini berlaku mulai 15 Januari 2025, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Kepbadan) No. 2 Tahun 2025 yang diterbitkan pada 12 Januari 2025.

Langkah tersebut disambut antusias oleh petani, karena menjadi angin segar di tengah tantangan kenaikan biaya produksi. Penyuluh pertanian lapangan, Kecamatan Jayakarta, Efki Sugriawan berharap kebijakan ini akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan petani.

"Tentunya ini kabar yang sangat menggembirakan buat para petani, apalagi di tengah harga sarana dan prasarana pertanian yang terus naik. Kenaikan harga gabah akan menjadi kompensasi yang seimbang," ujar Efki.

Menurut Efki, saat ini harga gabah di Desa Jayamakmur, wilayah binaannya, sudah menunjukkan tren positif sejak musim panen lalu. Pada musim panen sebelumnya, harga gabah sudah mencapai Rp 6.000-7.000/kg untuk kualitas kadar air yang sesuai ketetapan pemerintah. Bahkan, hasil panen yang menggunakan mesin pemanen modern seperti *combine harvester* bisa mencapai harga Rp 7.000/kg.

Namun, faktor cuaca masih sangat memengaruhi harga. Misalnya, saat hujan turun tiga hari berturut-turut, harga bisa turun lagi ke kisaran Rp 5.800-6.300/kg. Karena

itu, Efki berharap pentingnya peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga di tingkat petani. "Selama ini, harga gabah di tingkat petani sering kali masih diatur tengkulak. Dengan adanya keputusan pemerintah, kami berharap harga ini bisa stabil dan adil," tambahnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa kenaikan HPP saja tidak cukup jika tidak diimbangi dengan pengendalian harga bahan pokok dan sarana produksi pertanian. "Harga sarana produksi terus naik, jadi jika bahan pokok bisa lebih terjangkau, dampaknya akan lebih terasa bagi petani," ungkap Efki.

Efki melaporkan, produktivitas padi di wilayah binaannya menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun lalu, meskipun petani harus menghadapi tantangan seperti serangan hama penggerek batang dan tikus. Produktivitas rata-rata mencapai 6,8 ton/ha. "Ini hasil yang cukup baik untuk mendukung ketahanan pangan nasional," katanya.



Ia menambahkan, saat ini petani baru saja selesai panen dan sedang bersiap memulai musim tanam berikutnya. Dalam konteks ini, Efki berharap ada sinergi antara pemerintah dan pengusaha dalam menyerap gabah dengan harga yang kompetitif.

"Jika ada oftaker dari pemerintah yang membeli gabah sesuai ketentuan, tentu pengusaha lain akan bersaing. Ini akan menguntungkan petani karena mereka bisa mendapatkan harga yang lebih baik," tutup Efki. **Herman/Yul**

Ketua Umum Perpadi: Bagian Konsekuensi Bisnis

Pemerintah memastikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah naik menjadi Rp 6.500/kg, sedangkan harga beras Rp 12.000/kg di gudang Bulog. Dengan kenaikan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani. Bagaimana dengan pelaku usaha penggilingan padi?

Kenaikan harga ini merupakan langkah strategis untuk mendukung kesejahteraan petani, terutama di tengah musim panen raya. Dengan harga yang lebih tinggi, diharapkan para petani dapat menutupi biaya produksi yang semakin meningkat, serta meraih keuntungan yang lebih layak.

Selain itu, keputusan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dalam negeri, dengan memberikan harga yang adil bagi petani sekaligus memastikan pasokan gabah yang cukup.

"Sebenarnya kalau kita bicara HPP itu, harapan pemerintah kan supaya masyarakat dalam hal ini petani menerima keuntungan yang lebih besar. Tentunya kami menyambut baik," kata Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Penggilingan Padi dan Pedagang Beras Indonesia (Perpadi), Sutarto Alimoeso menanggapi kenaikan HPP gabah/beras yang pemerintah berlakukan mulai 15 Januari 2025.

Menurut Sutarto, harga gabah yang baru akan memberikan

peluang bagi petani untuk memperoleh hasil yang optimal dari setiap hektarnya. Meski kebijakan kenaikan HPP gabah memberikan angin segar bagi petani, namun disisi lain mantan Dirut Perum Bulog ini mengakui akan menambah beban modal bagi pengusaha penggilingan padi dengan naiknya harga gabah di lapangan.

"Bagi penggilingan padi, tentunya uang yang diperlukan untuk pengadaan tentunya pasti akan meningkat dengan kenaikan HPP gabah dari Rp 6.000 menjadi Rp 6.500/kg. Tapi itu kan bagian dari konsekuensi kita berbisnis," katanya.

Meski Soetarto mengakui bahwa kenaikan HPP ini dapat mengurangi keuntungan penggilingan padi karena meningkatnya biaya pembelian gabah. Namun, ia tetap optimis bahwa strategi pengelolaan yang baik dapat membantu pengusaha menghadapi tantangan ini. "Kami harus memilih kualitas yang lebih baik untuk cadangan beras pemerintah," ujarnya.

Karena itu Sutarto menegaskan, pihaknya akan terus mengawasi agar mekanisme pasar berjalan dengan baik, sehingga para petani dapat menjual gabah dengan harga yang

menguntungkan. "Kita akan ikuti dan saya pikir yang lebih penting itu sebenarnya bagaimana kita pasarnya ini bisa terjamin dengan baik," tuturnya.

Dalam Musyawarah Nasional (Munas) Perpadi ke-VI, Sutarto yang terpilih kembali menjadi Ketua Umum Perpadi periode 2025-2030, menekankan pentingnya pengoptimalan penyerapan gabah petani untuk menjaga stabilisasi harga saat panen raya.

"Pengusaha penggilingan padi dan Bulog diharapkan mampu mengoptimalkan penyerapan gabah petani," ujar Soetarto. Bahkan Perpadi sebagai mitra strategis pemerintah berkomitmen membantu penyerapan hasil panen secara maksimal.

Bulog menargetkan penyerapan sekitar 2,5-3 juta ton setara beras pada tahun 2025. Target ini mencakup 600 ribu ton Gabah Kering Panen (GKP), 900 ribu ton Gabah Kering Giling (GKG), dan 1,5 juta ton beras dari seluruh Indonesia. "Kita sudah menandatangani kerjasama dalam pengadaan gabah dan beras dengan Bulog. Di daerah mana, berapa



penyerapannya dan sebagainya. Ini yang sedang kita garap dengan Bulog," katanya.

Agar penyerapan ini berjalan efektif, Sutarto mengatakan, kualitas penggilingan padi perlu ditingkatkan sehingga hasil beras yang diproduksi memiliki kualitas yang lebih baik. Jadi ke depan bagaimana Perpadi mendorong revitalisasi penggilingan padi, khususnya yang kecil. "Kami sudah melakukan penandatanganan atau semacam MoU dengan perbankan untuk penyaluran kredit alsintan yang bunganya lebih murah, sekitar 3 persen," katanya. **Gsh/Yul**

Ketua Komisi IV: Panen, Bulog harus segera Turun

Musim panen padi yang mulai berlangsung di beberapa daerah menjadi sorotan anggota dewan. Pasalnya, saat panen biasanya harga gabah di tingkat petani anjlok. Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto meminta Perum Bulog untuk segera menyerap gabah petani dengan mengacu pada ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah Rp 6.500/kg.

Pembelian gabah oleh Bulog mau tidak mau harus dilakukan mengingat selama ini Kementerian Pertanian sudah memberikan berbagai fasilitas dan bantuan mulai dari pupuk yang naik 100 persen, benih gratis hingga alat mesin pertanian (Alsintan).

"Kami dari DPR menghimbau agar Bulog segera melaksanakan fungsinya menyerap berapapun

panen yang dihasilkan petani supaya kerja keras petani, dan bantuan-bantuan yang diberikan Pemerintah tidak sia-sia," katanya.

Titiek mengaku heran mengapa harga gabah di Bantul anjlok hingga Rp 5.500/kg. Padahal HPP yang berlaku saat ini adalah sebesar Rp 6.500/kg. Karena itu, ia mengingatkan jangan sampai penurunan ini berdampak besar pada kerugian petani di seluruh Indonesia.

"Sangat disayangkan pada saat panen harga gabahnya turun dan ini tentunya akan merugikan petani karena harga yang ditetapkan Rp 6.500, tapi disini Rp 5.500/kg," ujar Titiek Soeharto saat meninjau jalannya panen raya bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kabupaten Bantul, Rabu (15/1).

Titiek juga mengapresiasi peningkatan produktivitas gabah di Kabupaten Bantul yaitu sebesar 7,7 ton/ha. Kenaikan ini dinilai Titiek merupakan sebuah keberhasilan dari berbagai program dan juga bantuan seperti pupuk, benih dan alsintan yang telah didistribusikan. "Kita menyaksikan kelompok tani sudah ada yang mendapat combain harvester, kemudian pupuk dan hari ini kami menyaksikan hasil panen yang cukup besar yaitu 7,7 ton/ha," katanya. **Yul**



Reog Ponorogo Meriahkan Grand Launching NIMBUS 107,7/107,7 SC di Ngawi

PT Agricon Indonesia didukung oleh ZEN-NOH Mitsubishi Crop Protection Corporation (ZMCP) Jepang menghadirkan NIMBUS 107,7/107,7 SC, yaitu produk herbisida pengendali gulma. Grand Launching NIMBUS 107,7/107,7 SC bertempat di lapangan Desa Ploso Lor, Kecamatan Karang Jati, Kabupaten Ngawi, yang diikuti oleh 600 orang petani se-Jawa Timur, Rabu (15/1/2025).

Acara dimeriahkan oleh Reog Ponorogo, seni tradisional simbol dari gotong royong, yang kini resmi masuk dalam Daftar Warisan Budaya Takbenda UNESCO. Selain itu, berbagai hadiah menarik juga tersedia, berupa peralatan sarana produksi pertanian, peralatan elektronik, dan sepeda motor. Kegiatan petani juga dilakukan kunjungan lahan di Agricon Learning Centre (ALC) dengan luas lebih dari 1 Ha. Petani menikmati kunjungan lahan demplot herbisida NIMBUS 107,7/107,7 SC dibanding dengan kebiasaan petani, selain itu juga diperlihatkan teknologi paket BISSA yaitu meningkatkan produksi Padi dengan produk Blast, Inari, Spontan, Spontanking dan Agrimore.

"Komitmen kami adalah membantu petani Indonesia, melalui produk-produk berteknologi yang sangat bermanfaat untuk aktivitas petani. PT Agricon Indonesia sudah berdiri sejak 56 tahun yang lalu. NIMBUS 107,7/107,7 SC adalah produk paten, herbisida pra tumbuh yang diaplikasikan untuk mencegah gulma daun lebar, daun sempit, dan teki-teki. NIMBUS 107,7/107,7 SC membantu bapak ibu petani mencegah pertumbuhan gulma sampai lebih dari 30 hari. Petani tidak perlu matun (mencabut rumput) lagi sehingga menghemat biaya produksi. Kami sangat berterima kasih atas kerja keras para petani untuk menjaga pertanian Indonesia, dan membantu pemerintah untuk mensukseskan swasembada pangan," kata Fajar Aji Prakoso, Business Area Manager PT Agricon Indonesia.

President Director ZMCP, Akiko Sumida turut hadir dalam Grand Launching, beserta Director Development Division, Shigeki Fuji dan Manager Development, Shoji Nagamatsu.

"ZMCP adalah afiliasi dari ZEN-

OH, yang merupakan Induk Koperasi Pertanian Jepang,, merupakan perusahaan terkemuka dibidang pertanian di Jepang memproduksi NIMBUS 107,7/107,7 SC untuk petani. Bahan aktif Tefuriltrion 107,7 g/L dan Oksaziklomefon 107,7 g/L untuk gulma berdaun sempit dan berdaun lebar. Gulma di Indonesia agak sulit dikendalikan karena sering hujan. Kami yakin NIMBUS 107,7/107,7 SC merupakan solusi yang cocok untuk menghadapi tantangan para petani Indonesia yaitu pengendalian gulma. NIMBUS 107,7/107,7 SC juga telah membantu para petani di Jepang," kata President Director ZMCP, Akiko Sumida.

Sementara itu Director Development Division ZMCP, Shigeki Fuji, kagum dengan banyaknya hewan Capung yang beterbangan di sekitar lokasi pertanaman padi.

"Banyaknya capung berarti kondisi lahan yang sehat, terimakasih petani sudah menerapkan pertanian ramah lingkungan. Kami telah mengkonsumsi nasi di Indonesia," kata Director Development Division ZMCP, Shigeki Fuji.

Dalam kesempatan wawancara khusus dengan Sinar Tani, Akiko Sumida mengatakan bahwa di negara 4 musim seperti di Jepang, pertanaman padi hanya di musim gugur (Autumn) yaitu bulan Mei dan sudah panen di September, musim dingin (Winter) tidak ada penanaman. Perlu waktu bertahun-tahun riset yang dilakukan untuk menciptakan NIMBUS 107,7/107,7 SC, sehingga petani harus diedukasi untuk penggunaan produk herbisida sesuai rekomendasi, tidak berlebihan. Hal ini mencegah isu resistensi hama terhadap pestisida, atau hama yang "kebal" terhadap pestisida. Sebab, petani akan mengalami kesulitan mencari produk pengendalian gulma yang efektif.

Grand Launching NIMBUS 107,7/107,7 SC juga dihadiri oleh



Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono. Pria yang akrab disapa "Riyono Caping" adalah putra seorang petani, lahir di Magetan Jawa Timur dan membidangi urusan pertanian.

"Produk Agricon yang dilaunching ini tujuannya adalah untuk kesejahteraan petani. Pertanian adalah Soko Guru kebangkitan ekonomi nasional kita. Program Swasembada Pangan yang dicanangkan oleh Presiden, yang menjadi "tulang punggung" adalah petani. Cita-cita Presiden Prabowo Subianto dalam tiga tahun ke depan sudah swasembada pangan. Semua pihak berkolaborasi termasuk sektor swasta yang menyediakan benih, pupuk, alsintan, dan pestisida. Saya yakin dengan kerjasama maka swasembada pangan akan tercapai. Kuncinya adalah petani Sejahtera," kata Riyono Caping.

Riyono Caping menambahkan pentingnya peran penyuluh pertanian untuk memberikan edukasi kepada para petani, dan mengapresiasi rencana penarikan penyuluh pertanian ke pusat.

Kesejahteraan penyuluh pertanian juga sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah. Idealnya 1 orang penyuluh untuk 1 desa.

Selain penyuluh pertanian, Riyono Caping juga mengapresiasi pupuk bersubsidi yang telah disalurkan langsung ke petani. Ketersediaan pupuk diharapkan dapat dipenuhi sesuai azas 6 (enam) Tepat yaitu tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat tempat, tepat mutu dan tepat harga.

"Distribusi sangat penting diperhatikan oleh Pupuk Indonesia, supaya betul-betul sampai ke petani. Juga kualitas pupuk agar selalu dijaga dan ditingkatkan. Saya juga mengapresiasi PT Agricon Indonesia dengan terselenggaranya kegiatan ini, sebagai bentuk edukasi pada petani," tuturnya.

Grand Launching NIMBUS 107,7/107,7 SC dihadiri juga oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi, Kepala Desa Ploso beserta jajarannya, Camat Karang Jati, Notaris, Dinas Sosial, Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), Kapolsek, dan Koramil.



NIMBUS 107,7/107,7 SC, Solusi Jitu Agricon Bantu Petani Kendalikan Gulma

Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) jenis gulma adalah salah satu tantangan yang dihadapi oleh petani, sebab dapat mengganggu produktivitas tanaman padi. Gulma adalah pesaing dalam menyerap unsur hara dan air, sehingga tanaman padi tidak bisa tumbuh dengan optimal dan berpotensi menurunkan hasil panen. Gangguan gulma dapat menurunkan produksi hingga sekitar 38%, juga sulitnya mencari tenaga kerja cabut rumput/matun di petani membuat biaya pengendalian rumput semakin mahal.

PT Agricon Indonesia menyelenggarakan Grand Launching NIMBUS 107,7/107,7 SC di Ngawi, Rabu (15/1), menghadirkan 600 petani Jawa Timur yaitu Ngawi, Nganjuk, Madiun, Bojonegoro, Tuban, Jombang, Kediri, dan Gresik. Produk herbisida ini sebagai solusi jitu dari Agricon membantu petani kendalikan gulma.

"Produk NIMBUS 107,7/107,7 SC herbisida PATEN yang dipunyai PT Agricon dengan kandungan bahan aktif grup 27 dan grup 30, tertinggi di kelas herbisida. Kandungan dua bahan aktif ini dengan sasaran gulma daun lebar sekaligus gulma daun sempit. NIMBUS herbisida pra tumbuh juga disebut sebagai herbisida biji, sehingga cara aplikasi dengan penyemprotan secara merata dilahan pada waktu setelah perataan akhir sebelum tanam padi sampai setelah tanam maksimal 3 hari, dosis per Hektar cukup 300 ml saja. Aplikasi diawal memberikan manfaat bagi tanaman padi karena unsur hara dan pupuk dilahan akan diserap oleh tanaman padi tanpa diganggu gulma atau rumput, sehingga kompetisi pupuk tidak terjadi, dampaknya pertumbuhan padi lebih maksimal," kata Fajar Aji Prakoso selaku Business Area Manager.

"Kabupaten Ngawi adalah sebagai lumbung pangan di Jawa Timur. Produksi padinya adalah nomor dua se-Jawa Timur setelah Kabupaten Lamongan, walaupun luas Ngawi nomor 6 di Jawa Timur. Kabupaten Ngawi mempunyai program yaitu Pertanian Ramah

Lingkungan Berkelanjutan. Dalam proses pengendalian hama tanaman padi menggunakan produk perpaduan antara organik dan non organik. Petani pun sudah diedukasi membuat pupuk organik. Ramah lingkungan artinya kita harus bijak menggunakan pupuk dan produk-produk pengendalian hama agar lahan tidak rusak. Program Bapak Presiden kita harus swasembada pangan dalam waktu kurang dari 5 tahun," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi, Supardi.

Petani sangat antusias mengikuti rangkaian acara, yaitu meninjau demplot tanaman padi untuk melihat hasil pengaplikasian NIMBUS 107,7/107,7 SC, yang terlihat nyata lebih efektif mengendalikan gulma dibandingkan produk merk lain. Petani juga mendapatkan edukasi lengkap oleh Tim Agricon tentang pengendalian hama gulma. Dalam sekali aplikasi, gulma terkendali.

Para petani memberikan berbagai testimoni tentang NIMBUS 107,7/107,7 SC.

"Saya coba NIMBUS 107,7/107,7 SC di lahan hasilnya rumput tidak tumbuh dan bersih," kata Sukarno, petani dari Sumber Bening 1, RT 03 RW 1, Kecamatan Bringin, Ngawi.

Setelah pemakaian NIMBUS 107,7/107,7 SC, petani juga tidak perlu matun/mencabut rumput lagi secara manual.

"Biasanya kalau saya pakai obat rumput masih matun, pas coba NIMBUS 107,7/107,7 SC sudah tidak perlu matun lagi," kata Juni, petani dari Sumber Bening 1, RT 02 RW 1, Kecamatan Bringin, Ngawi.



NIMBUS[®] 107,7/107,7 SC

Agricon Indonesia

NIMBUS

Herbisida lain

Produk Paten
PREMIUM QUALITY

Sekali Aplikasi Gulma Terkendali

Tanaman padi tumbuh maksimal, terlindungi dari gulma sejak dini

Rekomendasi
30 ml/tangki
1 tutup Nimbis untuk satu tangki atau 300 ml per hektar

=

1 Tutup = 1 Tangki

Deagulan
(Leptochloa chinensis)

Jawan
(Echinochloa colona)

Teki
(Cyperus iria)

Eceng
(Monochoria vaginalis)

Info lebih lanjut :
0251-8313070



Fitri Patmawati, Polisi yang Mengerti Bahasa Hewan



Jalan hidup kadang kita semua tak mengetahui. Kuliah di Fakultas Kedokteran Hewan, IPB University, Fitri justru terjun menjadi seorang polisi. Tak hanya bertugas sebagai anggota polisi, ia juga berprofesi sebagai dokter hewan.

Berpangkat Kopol, Fitri Patmawati adalah seorang perempuan Perwira Menengah Polri yang saat ini menjabat sebagai Kaur Doksik Biddokkes Polda Jambi. Memang tidak banyak yang mengetahui peran profesi langka yang dilakoni Fitri tersebut. Bahkan banyak juga yang terkejut kalau ternyata Fitri adalah lulusan IPB University yang bertugas sebagai anggota polisi.

Fitri merupakan satu-satunya dokter hewan yang dimiliki Polda Jambi. Ia mulai bertugas di Polda Jambi sejak 2015, saat itu, ia menjabat sebagai Kanit K9 Ditsabhara Polda Jambi, kemudian tepat pada 2017, ia ditugaskan di Biddokkes Polda Jambi dan memiliki peran penting sebagai dokter hewan yang tidak banyak diketahui masyarakat, juga anggota Polri sendiri.

Menurutnya, sejauh ini, banyak orang beranggapan, peran seorang dokter hewan yang bertugas di kepolisian hanya terbatas pada perawatan K9, atau yang lebih dikenal sebagai anjing pelacak. "Banyak yang beranggapan, dokter hewan ya hanya mengurus K9 saja, padahal banyak hal yang bisa dilakukan di luar itu," kata perempuan kelahiran Serang, Banten 8 Juni 1986 tersebut.

Pada hal, perannya jauh lebih banyak. "Mulai dari sisi kesehatan, profesi dokter hewan juga berperan penting, dalam melakukan pencegahan preventif kesehatan manusia, dan menjaga keamanan bahan pangan hasil hewan," ujar Fitri Patmawati yang juga aktif membuka praktek di rumahnya sebagai dokter hewan.

Ia menuturkan, dokter hewan sangat berperan penting dalam pencegahan preventif kesehatan, karena ada sejumlah penyakit yang dapat ditularkan hewan. "Kalau dari bahan pangan hasil hewan, seperti telur, susu dan daging itu kan, ya itu kita yang awasi," imbuh anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan AKP. Parno dan Ruwati.

Menariknya lagi, dokter hewan juga memiliki peran tersendiri dalam bidang forensik. Dengan segudang pengalamannya, Polwan cantik yang sebelumnya bertugas di Direktorat Polisi Satwa Baharkam Polri ini menjelaskan, dokter hewan juga dibutuhkan dalam pengungkapan kasus tertentu. "Yakni terkait dengan Forensik Veteriner, Dokter hewan akan berperan, terkait pemeriksaan kasus kematian yang disebabkan hewan. Seorang dokter hewan dapat memeriksa penyebab hewan tersebut melakukan penyerangan terhadap manusia hingga tewas," katanya.

Dokter hewan juga berperan untuk membantu kasus kekerasan terhadap hewan yang sering ditangani komunitas pecinta hewan. Misalnya, kasus yang sempat viral di wilayah Medan, Sumatera Utara, sang pemilik menemukan kepala kucingnya telah dipotong oleh seseorang.

Untuk membuktikan hal tersebut, forensik veteriner menjadi kunci pemecahan masalah tersebut. Dokter hewan akan menjadi saksi ahli untuk pembuktian tersebut. "Saya berharap, di Kepolisian ada dokter hewan ahli forensik veteriner yang telah disekolahkan khusus di

luar negeri, sehingga bisa menjadi saksi ahli," jelasnya.

Ilmu Telepati

Sebagai polisi yang bertugas menangani terkair hewan, Fitri ternyata menguasai ilmu *Linking Awaranes*, atau akrab dikenal sebagai ilmu telepati. Ilmu *Linking Awaranes* merupakan bidang ilmu yang mampu berkomunikasi non verbal pada hewan, mulai dari kucing, anjing, gajah dan hewan lainnya. "Ini ilmu ini membuat kita mampu berkomunikasi dengan hewan, tetapi non verbal ya. Bukan berarti bisa bicara ke hewan seperti ke manusia," katanya.

Dengan menguasai ilmu tersebut, Fitri dapat memahami psikologis hewan, mulai dari penyebab hewan stres, tidak nafsu makan dan lain sebagainya. Pada kehidupan sehari-hari, hewan juga mencoba berkomunikasi dengan manusia. Hanya saja, manusia tidak memahami, sehingga banyak hewan peliharaan yang stres. "Jadi sebenarnya, mereka menyampaikan pesan, mulai dari bagian-bagian tubuh yang tidak mau disentuh oleh manusia, dan lainnya," kata Fitri.

Kemampuan tersebut didapat ketika dirinya mengikuti kelas atau pelatihan skala internasional tentang Ilmu *Linking Awaranes* di Waykambas. Disana, Fitri dipertemukan dengan Polwan dari berbagai negara, mulai dari Polwan dari negara Kanada, India serta negara lainnya. "Untuk menguasai ilmu tersebut, butuh proses dan latihan yang disiplin, bahkan harus diasah secara terus menerus," katanya.

Tugas yang paling berkesan, saat dirinya ditugaskan menjadi salah satu polwan pasukan berkuda, banyak ilmu berkuda dan pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Meski ada sukanya, kejadian menyedihkan juga kerap terjadi. "Dukanya, saya sedih ketika satwa sakit yang ditangani tidak bisa

selamat. Amat disayangkan, saya bisa merasakan itu," sampainya.

Meski berprofesi sebagai dokter hewan, tidak jarang, Fitri juga turut dalam sejumlah kasus-kasus yang berhubungan dengan forensik dan identifikasi, yang tergolong ekstrem atau menyeramkan. Terakhir, Fitri juga turut membantu dalam proses identifikasi penemuan tengkorak manusia di dalam mobil, yang tenggelam di kanal PT WKS Tanjung Jabung Timur, beberapa waktu lalu. "Yang ditangani langsung itu, ya dokter spesialis forensiknya, tetapi saya bagian managerialnya, tetapi tetap turun langsung ke lokasi," kata Fitri.

Dirinya mengaku sempat merasa takut, tetapi seiring berjalannya waktu dan komitmen dalam membantu pengungkapan kasus, rasa takut berangsur hilang. "Awalnya sih ada rasa takut gabung dengan Dokter forensik, karena ketemu sama jenazah manusia yang tidak utuh, tinggal tengkorak, pastilah ada rasa raket," ungkapnya.

Ketika lulus SMA tahun 2003, sebenarnya Fitri diterima di Fakultas Kedokteran Hewan (FKH)-UGM melalui jalur UM-UGM, sekaligus juga diterima di FKH IPB University melalui jalur USMI. Dengan berbagai pertimbangan, ia akhirnya memilih untuk melanjutkan sebagai mahasiswa di Fakultas Kedokteran Hewan IPB.

Semasa kuliah, Fitri aktif sebagai anggota Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Aikido pada tahun 2003/2004, Himpunan Minat dan Profesi Hewan Kesayangan dan Satwa Liar pada tahun 2004/2005 saktif sebagai ketua Veterinary English Club (VEC) pada tahun 2005/2006. Meski berprofesi sebagai Polisi, Fitri mengaku sangat menikmati tugasnya, karena memang dirinya penyayang hewan. "Saya sangat enjoy ketika bertugas menangani satwa K9 maupun kuda saat bertugas," ujarnya. **Sumber alumniipbpedia/Yul**

Membangun Pemasaran Adil bagi Petani

Oleh: **Muhammad Syahri Mubarak, SST., M.P.,**
Penyuluh Pertanian di BPSIP Jawa Tengah

(Bagian I)

Perekonomian Indonesia yang sebagian besar ditopang sektor pertanian, sudah seharusnya diperhatikan pemangku kebijakan di negeri ini dan jangan sekali-kali mengabaikan sektor pertanian. Sebagai tulang punggung perekonomian dan penopang ketahanan pangan nasional, banyak masyarakat pedesaan yang bergantung hidup dari sektor pertanian.

Jika produksi di sektor pertanian terganggu, maka bisa mendorong terjadinya kenaikan harga (inflasi) dan tentu dapat menimbulkan instabilitas politik jika harga-harga naik tak terkendali. Para petani di negeri ini mempunyai peran penting dalam menyediakan kebutuhan bahan pangan, namun mereka seringkali terjebak dalam pemasaran yang tidak adil.

Nilai jual komoditas pertanian yang diterima petani seringkali jauh lebih rendah dibandingkan dengan nilai harga jual yang dibayar konsumen. Hal ini, mengakibatkan para petani kesulitan untuk meningkatkan kesejahteraan, sementara para pedagang besar dan tengkulak meraih keuntungan besar.

Karena itu, membangun pemasaran yang lebih adil bagi para petani sangatlah penting, agar mereka bisa memperoleh harga yang lebih baik dan layak sehingga berdampak pada kesejahteraan mereka yang meningkat.

Rantai pasok produk pertanian yang terlalu panjang, selama ini

menjadi salah satu penyebab utama terjadinya ketidakadilan dalam pemasaran hasil pertanian yang dialami oleh petani. Ditingkat lapangan, seringkali terdapat banyak tangan perantara sebelum produk pertanian sampai langsung ke tangan konsumen, mulai dari tengkulak, pengepul, hingga para distributor besar yang akhirnya membuat harga yang diterima oleh petani jauh lebih rendah dari harga konsumen ditingkat pasar. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

- **Terbatasnya akses langsung antara petani dan konsumen,** sampai saat ini masih banyak petani yang tidak memiliki akses langsung ke pasar besar atau konsumen akhir. Namun sebaliknya, para petani lebih bergantung pada para perantara atau tengkulak yang terkadang langsung datang ke lahannya untuk menentukan nilai harga jual produk pertanian yang dihasilkannya.

- **Rendahnya nilai daya tawar petani,** umumnya para petani memiliki keterbatasan baik terkait modal maupun sumberdaya, seringkali mereka tidak memiliki kekuatan daya tawar yang cukup untuk mendapatkan harga jual yang layak dan wajar. Kebanyakan petani terpaksa menjual hasil pertanian mereka kepada para tengkulak atau pengepul sesegera mungkin, karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga mereka yang mendesak.

- **Keterbatasan akses informasi untuk mengetahui harga realtime pasar,** petani cenderung tidak memiliki akses informasi yang memadai untuk mengetahui harga realtime pasar yang berlaku tiap harinya, sehingga mereka tidak dapat menentukan dan menawar harga yang lebih baik ketika sudah ditawarkan oleh para tengkulak yang senantiasa hadir lebih awal langsung di lahan.

- **Sistem pembiayaan permodalan yang berjalan selama ini kurang memadai dan belum berpihak kepada petani,** juga menjadi salah satu penghalang/penghambat bagi petani untuk memperoleh modal

awal dan standar harga produk pertanian yang wajar/layak. Banyak petani yang akhirnya bergantung kepada para tengkulak untuk memperoleh modal awal dalam menjalankan usahataniannya. Hal itulah, yang akhirnya menyebabkan para tengkulak seringkali memberikan harga yang sangat rendah, karena mereka mengetahui posisi nilai tawar petani yang masih lemah. Pada akhirnya, para petani terpaksa menjual hasil pertaniannya kepada para tengkulak yang telah memberikan modal awal dengan harga yang sangat murah karena desakan kebutuhan hidup keluarga mereka.■



HPP 6500

Tahun 2025 kelihatannya menjadi tahun berkah bagi petani. HPP naik dari Rp 6000 menjadi Rp 6500, pupuk subsidi akan tersedia lebih banyak, bantuan mekanisasi dan pompa air dikurcikan dan KUR penyalurannya dipermudah. Terlebih lagi peran Bulog ditingkatkan dalam menyerap produksi gabah petani. Petani pantas bergembira dan kita semua berharap semua ini memberi dampak insentif buat petani untuk lebih giat memproduksi dalam upaya mencapai swasembada beras dan meningkatkan ketahanan pangan.

Perlu diantisipasi bahwa kejadian selalu berulang, setiap panen raya tiba harga gabah menukik tajam membuat petani kehilangan harapan memperoleh imbalan kerja kerasnya. Walaupun dengan berbagai kebijakan pengamanan harga lewat HPP biasanya di lapangan harga merosot tak tertahankan.

Itulah pula yang diingatkan oleh Ketua DPR RI dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, jika perangkat yang menangani untuk menyerap hasil panen lengah, maka harga gabah bisa meluncur jatuh. Mekanisme pasar pasti terjadi sehingga Bulog diwanti-wanti untuk berperan penuh dalam menyerap hasil panen petani. Tapi tentu saja ada alasan rasional Bulog. Harga Rp 6500 itu ada persyaratannya, yaitu gabah harus memenuhi standar yang ditetapkan, khususnya persentase butir hampa dan kadar air. Nah, ini musim hujan. Segala kekuatan bisa saja terjadi.

Segala upaya memang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi. Walaupun perjalanannya tidak selalu mulus membantu petani. Penyaluran pupuk subsidi masih mengalami berbagai kendala. Konon Gapoktan yang sekarang digadagadag menjadi penyalur pupuk subsidi juga perlu perhatian khusus.

Pertama, apakah Gapoktan masih berperan aktif dan kedua, margin pupuk subsidi itu sangat tipis. Margin sudah diatur demikian ketat, salah-salah tanpa manajemen yang ketat Gapoktan bisa kedodoran. Konon pula harga pupuk di pasar yang cukup tinggi membuat petani kelabakan.

KUR pada masa lalu banyak terkendala oleh BI Checking yang mengakibatkan banyak petani yang masih punya tunggakan tidak bisa akses terhadap pinjaman berbunga rendah ini. Masih banyak petani terlibat hutang pada para lintah darat yang masih giat beroperasi di pedesaan. Mudah-mudahan dengan membebaskan petani untuk memanfaatkan KUR tanpa persyaratan BI Checking akan mempermudah petani memperoleh modal kerja.

HPP Rp 6500 tentu saja akan sangat membantu petani. Diperlukan



Oleh: **Memed Gunawan**

pengawasan dan dukungan semua pihak terkait, agar kebijakan yang pro petani ini benar-benar dirasakan oleh petani. Paling tidak penghasilannya sedikit bertambah dan swasembada beras dapat diraih, untuk mengamankan negeri yang besar ini dalam membangun ketahanan pangan.

Bagaimana mengenai kesejahteraan petani? Ini tentu perlu ada upaya yang lebih keras. Dengan rata-rata pengusahaan lahan yang rendah, di bawah 0,5 hektar, bahkan lebih rendah lagi, kenaikan HPP dan kebijakan pro petani lainnya tak akan serta merta mendongkrak kesejahteraan petani. Semoga semua upaya baik ini berhasil baik.

Ekspor Produk Turunan Sawit Ikuti Aturan Baru

Kementerian Perdagangan mengumumkan perubahan penting dalam regulasi ekspor produk turunan minyak sawit dan residu melalui Permendag No. 2 Tahun 2025. Kebijakan tersebut berlaku mulai 8 Januari 2025 dengan fokus utama pada penguatan industri dalam negeri.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Kemendag) baru-baru ini menyelenggarakan sosialisasi mengenai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 2 Tahun 2025 yang mengatur perubahan Permendag No. 26 Tahun 2024 mengenai ketentuan ekspor produk turunan kelapa sawit.

Sosialisasi ini diadakan di Bekasi, Jawa Barat, Selasa, (14/1) yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan dari sektor kelapa sawit dan turunannya. Permendag tersebut menjadi tonggak penting dalam regulasi ekspor produk turunan kelapa sawit, terutama dalam pengendalian ekspor limbah industri kelapa sawit seperti Palm Oil Mill Effluent (POME), High Acid Palm Oil Residue (HAPOR), dan Used Cooking Oil (UCO).

"Peraturan ini bertujuan untuk memperketat pengawasan terhadap ekspor produk-produk tersebut, khususnya untuk mendukung industri dalam negeri, termasuk industri minyak goreng dan biodiesel," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Isy Karim.

Permendag No. 2 Tahun 2025 merupakan langkah strategis untuk memastikan ketersediaan bahan baku bagi industri minyak goreng dalam negeri dan mendukung program biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 40 persen (B40). "Permendag ini ditempuh untuk menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri minyak goreng, yang merupakan bagian dari program minyak goreng rakyat," ujar Isy.

Pengetatan Ekspor

Permendag No. 2 Tahun 2025 berfokus pada pengetatan ketentuan ekspor untuk produk turunan kelapa sawit, terutama yang terkait dengan limbah seperti UCO, POME, dan HAPOR. Kebijakan ini menurut Isy, dirancang untuk memastikan bahwa sumber daya alam yang dihasilkan oleh industri kelapa sawit Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal

untuk kepentingan industri dalam negeri, yang turut berperan penting dalam ketahanan pangan dan energi nasional.

Salah satu poin penting dalam peraturan ini adalah pembatasan ekspor produk turunan kelapa sawit. Dalam regulasi baru tersebut, ekspor UCO dan residu hanya dapat dilakukan jika disertai dengan persetujuan



ekspor (PE) yang diberikan oleh pihak yang berwenang. "Salah satu aspek penting yang diatur dalam Permendag ini adalah pemberian persetujuan ekspor (PE) yang hanya dapat diberikan jika alokasi ekspor disepakati dalam rapat koordinasi," ujar Isy.

Ia menambahkan, kebijakan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa pasokan bahan baku untuk industri dalam negeri tetap terjaga dan tidak terganggu oleh ekspor yang tidak terkendali. Kebijakan ini juga mengutamakan kebutuhan industri dalam negeri dengan menetapkan bahwa sebagian besar produk turunan kelapa sawit harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik.

"Pentingnya kebijakan ini dalam

mendukung industri minyak goreng, yang belakangan ini menjadi salah satu komoditas vital bagi masyarakat Indonesia," tambahnya. Selain itu, lanjut Isy, kebijakan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendukung implementasi biodiesel B40. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil dan mendukung pengembangan energi terbarukan.

Sejumlah Tantangan

Sementara itu, Farid Amir, Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Kemendag menambahkan, Permendag No. 2 Tahun 2025 didorong oleh



Buah Segar (TBS) yang langsung dibusukkan menjadi POME dan HAPOR. "Maraknya pencampuran CPO dengan POME dan HAPOR asli serta praktik pengolahan TBS yang dibusukkan langsung menjadi POME dan HAPOR harus dihentikan," tegas Farid.

Karena itu, salah satu hal yang ditekankan dalam sosialisasi ini adalah pentingnya koordinasi antara berbagai kementerian dan lembaga terkait dalam memastikan bahwa implementasi Permendag No. 2 Tahun 2025 agar dapat berjalan dengan baik. Namun kata Farid, meskipun terdapat pengetatan ekspor, eksportir yang telah memiliki PE berdasarkan Permendag sebelumnya tetap dapat melanjutkan ekspor produk mereka.

"Bagi eksportir yang sudah memiliki PE UCO dan PE residu yang diterbitkan berdasarkan Permendag sebelumnya, tetap bisa melaksanakan ekspor, asalkan PE tersebut masih berlaku sampai masa berlakunya habis," tambah Farid.

Farid pun berharap agar eksportir dapat menyediakan data yang akurat mengenai produksi, pasokan, dan konsumsi produk kelapa sawit yang akan diekspor. Data tersebut sangat penting untuk mendukung kebijakan ekspor yang akan diterapkan dalam Permendag No. 2 Tahun 2025. "Kami berharap eksportir dan asosiasi dapat menyampaikan data yang mendukung kebijakan ekspor produk CPO dan turunannya," katanya.

Tatang Yuliono, Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan berharap agar kerja sama yang baik antara pemerintah, eksportir, dan asosiasi dapat memperlancar implementasi kebijakan ekspor produk kelapa sawit dan turunannya. "Kerja sama yang baik antara pemerintah, eksportir, dan asosiasi sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif," ujarnya. **Yul**

kebutuhan untuk mengatasi sejumlah tantangan terkait dengan ekspor produk turunan kelapa sawit. Misalnya, meningkatnya permintaan internasional untuk produk seperti POME, HAPOR, dan UCO, terutama terkait kebijakan Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSA) yang dikeluarkan International Civil Aviation Organization (ICAO). "Permendag ini juga didasarkan pada pertumbuhan permintaan oleh kebijakan CORSIA," kata Farid.

Selain itu, Farid melihat saat ini banyak ditemukan praktik yang merugikan terkait pengolahan kelapa sawit, seperti pencampuran CPO dengan POME dan HAPOR asli, serta pengolahan Tandan

Mengejar Produksi Jagung, Melirik Lahan Kering dan Kebun

Jagung menjadi komoditas pangan strategis kedua setelah padi. Untuk meningkatkan produksi padi, pemerintah telah membuat program khusus yakni optimalisasi lahan dan cetak sawah. Untuk dua program tersebut, Kementerian Pertanian menggandeng TNI AD. Bagaimana dengan jagung?

Kementerian Pertanian pun menggandeng Polri. Bahkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mempersiapkan program tanam jagung serentak yang melibatkan anggota polri. Program tanam jagung serentak dirancang untuk memanfaatkan lahan perkebunan dan lahan kering di berbagai wilayah Indonesia. Target total luas tanam mencapai 1,7 juta ha.

"Kami ingin bahwa langkah-langkah yang kita ambil bersama Polri dengan potensi luar biasa 1,7 juta ha yang bisa ditanami dapat menguntungkan petani, pengusaha, masyarakat, dan negara," kata Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penanaman Jagung, Senin (13/1).

Melalui program tanam jagung serentak tahun 2025, lahan perkebunan dan lahan kering di berbagai wilayah Indonesia dapat dimanfaatkan untuk pertanaman jagung. Beberapa provinsi strategis seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Lampung, dan Jawa Tengah menjadi prioritas pelaksanaan.

"Kami ingat betul di Sumatera Utara dan Sumatera Barat ada uji coba penanaman jagung di lahan sawit dan itu berhasil. Di Jeneponto, pegunungan ditanami jagung. Kita ingin ulangi keberhasilan ini," ungkap Amran.

Pt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Ali Jamil, menegaskan bahwa program ini dirancang untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan perkebunan dan lahan kering lainnya guna meningkatkan produksi jagung nasional. Total lahan yang akan ditanam mencapai 1,7 juta hektare dengan produktivitas rata-rata 4 ton/ha. "Dari luas tersebut, kita harapkan 60% efektif ditanam, menghasilkan tambahan produksi sebesar 4 juta ton jagung atau meningkat 25% dari eksisting," kata Ali Jamil.

Data BPS menyebutkan, luas lahan kering di Indonesia mencapai 63,4 juta ha atau sekitar 33,7% dari total luas lahan Indonesia. Dari jumlah tersebut diperkirakan 8,8 juta ha telah dimanfaatkan untuk pertanian, 26,3 juta ha untuk pertanian lahan kering campur semak, dan 18 juta ha untuk perkebunan. Sisanya, sekitar 10,3 juta ha belum diusahakan.

Sementara itu, potensi lahan perkebunan, khususnya sawit untuk budidaya jagung juga cukup besar. Total kebun sawit di Indonesia saat ini seluas 16,2 juta ha dengan siklus peremajaan sawit 25 tahun. Pemerintah menargetkan program peremajaan setiap tahun sekitar 648.000 ha. Jika ditanami jagung bisa mendongkrak produksi jagung.

Menurut Ali Jamil, program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Polri yang akan mendukung pengawasan distribusi sarana produksi dan BULOG sebagai off-taker hasil panen. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan penyediaan benih unggul, pupuk, dan alat mesin pertanian (alsintan) berjalan sesuai rencana. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi kunci utama untuk menggerakkan penyuluh pertanian dan mendukung

pengelolaan usaha tani secara efektif.

Kolaborasi antara Kementan dan Polri juga mencakup pengawalan distribusi pupuk subsidi yang dilakukan Babinkamtibmas. Hal ini bertujuan untuk memastikan distribusi yang transparan dan menjangkau petani di seluruh wilayah yang menjadi target tanam.

Sebaran target tanam jagung dalam program ini mencakup beberapa provinsi strategis, di antaranya Kalimantan Tengah dengan luas 208.136 ha, Kalimantan Barat 191.838 ha dan Sumatera Selatan 156.431 ha. Selain itu, wilayah sentra produksi seperti Sulawesi Selatan, Lampung, dan Jawa Tengah juga menjadi prioritas.

Pengawalan Polisi

Dengan kerjasama dengan Polri, Amran berharap, kepolisian dapat mengawal program swasembada pangan termasuk mengawal kasus penyelewengan pupuk ataupun alat dan mesin pertanian. Dengan sinergi yang kuat antara Kementan, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan, Amran optimistis swasembada jagung dapat tercapai, sekaligus memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani dan stabilitas ekonomi nasional.

"Para Kapolda dan Kapolres seluruh Indonesia saya mengajak ke depan mimpi kita adalah meningkatkan produksi jagung," tambahnya. Amran mengaku, percepatan tanam bisa dilakukan melalui kolaborasi bersama para kelompok tani. Apalagi saat ini petani karena pemerintah telah menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jagung dari Rp5.000 menjadi Rp 5.500/kg.

"Saya katakan petani sangat mudah untuk kita ajak bercocok tanam, jagung itu kalau ada jaminan yang menyerap maka bagi petani ini sangat menguntungkan.

Presiden telah mengatakan pemerintah wajib menyerap produksi jagung dan padi melalui Bulog. Tidak boleh petani dibiarkan jalan sendiri," tuturnya.

Karena itu, Amran menekankan bahwa Bulog harus mengambil langkah krusial untuk menyerap hasil panen jagung. Bulog katanya, agar segera melakukan persiapan penyerapan terutama jelang Indonesia menghadapi panen raya. "Jangan sampai, semangat petani dalam melakukan produksi terhenti hanya gara-gara produksi mereka tidak terserap dengan baik," ujarnya.

Kenapa harus diserap? "Karena Bapak Presiden sudah memutuskan untuk harga jagung naik menjadi 5.500 harga dan harga gabah jadi 6.500 itu adalah bentuk perhatian Presiden. Subsidi pupuk juga ditambah menjadi Rp 24 triliun, ini dua kali lipat dibanding sebelumnya. Karena itu kami meminta Bulog untuk segera melakukan persiapan jangan sampai kita semangat tanam tapi tidak bisa memaksakan arahan Bapak Presiden," tuturnya.

Dengan adanya perluasan areal tanam jagung di lahan kering dan perkebunan, pemerintah menargetkan ada tambahan produksi hingga 4 juta ton atau meningkat 25 persen dari saat ini. "Mimpi kita adalah menaikkan produksi. Produksi tahun 2023-2024 berkisar 15 juta ton dan kita naikkan menjadi 16 juta ton. Tetapi manakala target yang kita canangkan bersama tercapai itu bisa mencapai 23 juta ton dibanding tahun 2024," papar Amran.

Sementara itu, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, Komjen Dedi Prasetyo menyampaikan bahwa Polri berkomitmen untuk mendukung Kementan dalam swasembada jagung demi mewujudkan kemandirian pangan. "Polri berperan sebagai penggerak kelompok tani, menjembatani antara kebutuhan petani dengan Kementan dan mengawasi distribusi bantuan dari negara agar sampai ke petani," ucapnya. **Yul**





Hasilkan Ayam Broiler Berkualitas, Ini Rahasiannya

Untuk menghasilkan ayam broiler berkualitas, peternak kini bisa memanfaatkan kombinasi nutrisi tepat dan teknologi terbaru yang meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan mendukung keberlanjutan peternakan



Meningkatkan kualitas ayam broiler merupakan tujuan utama peternak unggas. Namun banyak yang masih beranggapan semakin tinggi kadar protein dalam pakan, semakin baik hasil yang akan didapatkan.

Seringkali, protein dianggap sebagai "bahan bakar utama" yang mendukung pertumbuhan ayam. Namun, kenyataannya, yang digunakan tubuh ayam bukanlah protein utuh, melainkan asam amino yang merupakan komponen penyusun protein.

Karena itu, peternak perlu memahami pentingnya keseimbangan asam amino dalam pakan ayam untuk mendukung pertumbuhan optimal, meningkatkan efisiensi, dan meminimalkan pemborosan.

Nasril Surbakti, Vice President Feed Technology PT Charoen Pokphand Indonesia menekankan bahwa ayam broiler lebih membutuhkan keseimbangan asam amino dalam pakan ketimbang sekedar jumlah protein. "Bukan soal seberapa banyak protein, tetapi seberapa lengkap kandungan asam aminonya," ungkap Nasril.

Dalam hal ini, keberhasilan peternak dalam meningkatkan hasil produksi ayam broiler tidak hanya bergantung pada jumlah protein dalam pakan. Tapi menurut Nasril, juga pada keseimbangan asam amino yang terkandung di dalamnya.

Asam amino esensial seperti metionin, lisin, dan treonin berperan penting dalam menjaga kesehatan ayam broiler. Metionin mendukung pertumbuhan bulu dan jaringan tubuh, sementara lisin mempercepat pertumbuhan otot dan meningkatkan bobot tubuh

ayam.

Sementara itu, treonin sangat penting untuk menjaga kesehatan sistem imun dan pencernaan ayam. Ketiga asam amino ini merupakan elemen kunci yang harus ada dalam pakan ayam untuk mencapai pertumbuhan yang optimal. "Kekurangan asam amino dalam pakan dapat menghambat pertumbuhan ayam, menurunkan produktivitas dan meningkatkan risiko penyakit," katanya.

Hal ini lanjut Nasril, tentu merugikan peternak. Pasalnya, pertumbuhan ayam menjadi lambat atau kurang sehat, tidak dapat menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Sedangkan, jika kadar protein dalam pakan terlalu tinggi tanpa diimbangi dengan keseimbangan asam amino yang tepat, maka sebagian besar protein akan terbuang sia-sia dalam bentuk nitrogen yang dikeluarkan melalui ekskresi.

"Ini tidak hanya merugikan dari segi efisiensi, tetapi juga berpotensi mencemari lingkungan," katanya. Karena itu, Nasril mengingatkan, menyesuaikan formula pakan dengan kebutuhan nutrisi ayam sangat penting agar tidak ada sumber daya yang terbuang percuma.

Formulasi Pakan Tepat

Dengan formulasi pakan yang tepat, menurut Nasril, ayam broiler dapat memanfaatkan nutrisi secara maksimal. Bahkan penambahan asam amino esensial seperti metionin dan treonin dalam pakan ayam terbukti dapat meningkatkan daya tahan tubuh ayam terhadap penyakit serta mempercepat pertumbuhan.

Pendekatan ini juga terbukti lebih ramah lingkungan karena mengurangi ekskresi nitrogen yang dapat mencemari tanah dan air. Selain itu, dengan efisiensi pakan yang lebih

tinggi, peternak dapat menekan biaya produksi dan memperoleh margin keuntungan yang lebih besar.

"Karena biaya pakan merupakan salah satu komponen terbesar dalam biaya operasional peternakan unggas, efisiensi pakan sangat mempengaruhi kelangsungan usaha peternakan," tuturnya saat Seminar Nasional Masyarakat Ilmu Perunggasan Indonesia (MIPI) di IPB ICC, Kamis (16/1).

Namun, kata Nasril, masalah pencernaan bahan pakan juga menjadi tantangan besar dalam dunia peternakan unggas. Bahan baku utama pakan ayam seperti jagung dan bungkil kedelai masih menyisakan masalah pencernaan. Sebab, nutrisi dari bahan baku ini, seperti pati dan protein, tidak dapat dicerna maksimal oleh ayam.

Misalnya, pati hanya dapat dicerna hingga 6,6%, sementara protein yang tidak tercerna mencapai 27,3%. Kondisi ini mengurangi efisiensi produksi pakan secara keseluruhan. "Karena itu, pengoptimalan daya cerna pakan menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi produksi ayam broiler," katanya.

Teknologi Digital

Sementara itu Global Bisnis Development Head Poluta Inc, Allah Nawaz mengatakan, selain formulasi pakan yang tepat, teknologi kini menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan efisiensi dalam dunia peternakan unggas. Digitalisasi dan adopsi teknologi seperti Internet of Things (IoT), artificial intelligence (AI), dan big data dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas peternakan unggas.

Dengan teknologi IoT, menurutnya, peternak dapat memantau

kondisi peternakan secara real-time, seperti suhu kandang dan pola makan unggas. "Data yang terkumpul memungkinkan peternak untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan tepat dalam manajemen peternakan," katanya.

Teknologi juga berperan dalam memantau kesejahteraan unggas, termasuk memastikan kenyamanan kandang untuk mencegah stres pada ayam. Selain itu, teknologi memungkinkan pemberian pakan yang lebih tepat sasaran, yang pada gilirannya meningkatkan penyerapan nutrisi dan menghasilkan produk unggas yang lebih berkualitas.

Keberhasilan digitalisasi ini telah dibuktikan oleh perusahaan seperti Poultia Inc., yang berhasil mengurangi angka kematian broiler hingga 0,41%, meningkatkan *Feed Conversion Ratio* (FCR) sebesar 6%, dan memperbesar bobot ayam secara signifikan dalam waktu hanya enam bulan.

Dengan semakin berkembangnya teknologi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang nutrisi ayam, masa depan peternakan unggas Indonesia semakin cerah. Peternak yang dapat memadukan teknologi terkini dengan nutrisi yang tepat akan mampu mengoptimalkan produksi dan meningkatkan keberlanjutan peternakan.

Efisiensi pakan yang lebih tinggi dan pemanfaatan teknologi yang lebih canggih, peternak dapat mengurangi biaya produksi, meningkatkan kualitas hasil, dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Karena itu, penting bagi para peternak untuk terus berinovasi, mengadopsi teknologi baru, dan memperhatikan kebutuhan nutrisi ayam agar dapat menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di masa depan. **Gsh/Yul**

Kopi Robusta Silalabak

Angkat Derajat Iis Sunasih

Dari kantin sekolah ke kebun kopi, Iis Sunasih buktikan perjuangan tak pernah sia-sia. Berkat Kopi Robusta Ciamis, ia tak hanya ubah hidupnya, tapi juga jadi inspirasi petani muda masa kini!

Pandemi Covid-19 di tahun 2020 menjadi pukulan berat bagi banyak orang, termasuk Iis Sunasih, seorang penjaga kantin sekolah di Pangandaran.

Dengan ijazah SMP, ia bekerja keras untuk membantu perekonomian keluarganya. Namun, pembatasan aktivitas masyarakat membuat kantin tempatnya bekerja harus tutup, dan Iis kehilangan penghasilan utama. Situasi ini memaksanya untuk memutar otak dan mencari cara lain untuk bertahan hidup.

Suaminya, yang memiliki kebun kopi seluas 1 hektar di Sidamulih, memberi ide kepada Iis untuk mencoba peruntungan di bisnis kopi.

Awalnya, Iis sama sekali tidak tertarik. Ia hanya tahu kopi dari suaminya yang gemar menyeduh sendiri, dan biji kopi baginya tidak lebih dari tanaman yang tidak ia pahami.

Namun, kondisi ekonomi yang mendesak membuatnya mengambil keputusan besar. Dengan keberanian dan dukungan keluarga, Iis memulai perjalanan barunya sebagai pelaku

usaha kopi.

Tanpa pengalaman dan pengetahuan, Iis belajar dari nol. Bersama suaminya, ia menempuh perjalanan panjang untuk memanen biji kopi, bahkan harus bermalam di gubuk selama 20 hari.

Dengan memilih hanya biji kopi terbaik yang berwarna merah, Iis mulai memahami proses panen yang ideal. Tak berhenti di sana, mereka mencoba berbagai metode pengolahan kopi, seperti robusta wine, aerob, anaerob, dan anaerob termal, yang menciptakan rasa unik seperti aren, durian, hingga nangka.

Nama Silalabak dipilih sebagai merek usaha mereka, yang berarti "dasar loncatan" dalam bahasa Sunda. Nama ini bukan hanya sekadar identitas, tetapi juga simbol harapan Iis untuk keluar dari keterpurukan.

Kerja keras mereka mulai membuahkan hasil. Dalam sekali panen, kebun kopi mereka mampu menghasilkan sekitar 400 kilogram biji kopi, yang kemudian diolah menjadi berbagai produk unggulan seperti bubuk kopi, cokelat kopi, dan

camilan biji kopi.

Perjalanan membangun bisnis kopi tidaklah mulus. Iis sempat mengalami kerugian hingga jutaan rupiah di awal usahanya. Namun, ia tidak menyerah. Kesempatan emas datang ketika ia mengikuti program Petani Milenial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dalam program ini, Iis mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk mengembangkan usahanya. Rasa percaya diri yang awalnya menjadi hambatan mulai tumbuh setelah ia menyadari bahwa proses pengolahan robusta yang ia kembangkan sangat unik dan jarang dimiliki orang lain.

Kerja keras Iis membawa banyak pengakuan. Pada tahun 2022, ia meraih Juara 1 Favorit Anugerah Perkebunan kategori Petani Milenial dari Dinas Perkebunan Jawa Barat. Tidak hanya itu, ia juga dinobatkan sebagai Young Ambassador Agriculture 2024 dan menjadi Duta

Petani Milenial (DPM) Kementerian Pertanian.

Kini, Silalabak tidak hanya dikenal di Pangandaran, tetapi juga di Bandung, Jawa Timur, bahkan hingga mancanegara. Iis juga menjalin kemitraan dengan 19 kedai kopi, tiga hotel besar, dan pasar kreatif.

Selain fokus pada bisnis, Iis berkomitmen membimbing sedikitnya 20 petani kopi di Pangandaran melalui P4S Silalabak. Ia ingin memastikan regenerasi petani kopi terus berlanjut dengan cara yang inovatif dan berkelanjutan.

Iis berharap kopi Robusta Pangandaran bisa tampil di tingkat nasional hingga internasional. Dengan semangat kerja keras, inovasi, dan kemauan berbagi ilmu,

Iis Sunasih telah membuktikan bahwa tantangan bisa diubah menjadi peluang besar. Ia menjadi inspirasi nyata bagi generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian dengan penuh percaya diri. **Laily/Gsh**

PUPUK ORGANIK CAIR



HEMAT BIAYA
PANEN BERLIPAT
GANDA



TEKNOLOGI FERMENTASI
BAHAN ORGANIK BERMANFAAT UNTUK:

- Memperbaiki sifat biologis, fisik dan kimia tanah.
- Meningkatkan produksi tanaman dan menjaga kestabilan produksi
- Memfermentasikan bahan organik tanah dan mempercepat dekomposisi.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian yang berwawasan lingkungan.
- Meningkatkan keragaman mikroba yang menguntungkan di dalam tanah.
- Meningkatkan ketersediaan nutrisi dan senyawa organik dalam tanah.
- Meningkatkan Fiksasi Nitrogen/Bintil akar.
- Dapat mengurangi kebutuhan pupuk kimia dan pestisida.
- Dapat digunakan untuk semua jenis tanaman dan tanah.
- Pembuatan pestisida organik
- Pembuatan kompos bokashi.



L958/HAYATI/DEPTAN-PPVTPP/VIII/2011

Kadar Hara Pupuk

C organik = 27,05 % ; pH = 3,90 ;
N = 0,07 % ; P₂O₅ = 3,22 ppm ;
K₂O = 7675,0 ppm ; Ca = 1676,25 ;
Mg = 597,0 ppm ; B < 20 ppm ;
Cu < 0,01 ppm ; Mn = 3,29 ppm ;
Fe = 5,54 ppm ; Zn = 1,90 ppm ;

Mikroba:

Lactobacillus = 8,7 x 10⁵ sel/ml ;
Pelarut Fosfat = 7,5 x 10⁶ sel/ml ;
Yeast/Khamir = 8,5 x 10⁶ sel/ml ;

Diproduksi dan Dipasarkan
PT. SONGGOLANGIT PERSADA

KANTOR PEMASARAN :

JAKARTA & SUMATERA : Telp. (021) 78833766 & 78834091 Fax : (021) 78833766
E-mail : agoes_em4@yahoo.com, slpjakarta@em4-indonesia.com
JAWA TENGAH : Telp & Fax : (0293) 326593 E-mail : slpjtang@em4-indonesia.com
JAWA TIMUR : Telp & Fax : (031) 7405203 E-mail : slpjatim@em4-indonesia.com
BALI : Telp & Fax : (0361) 8424066 E-mail : slpbali@em4-indonesia.com

Web: www.em4-indonesia.com

Email : bokashiok@yahoo.com

ADVANCED TECHNOLOGY TOWARDS NATURE FARMING

AGRITIPS

Rahasia Membuat Kopi Tubruk Nikmat

Kopi tubruk, minuman khas Indonesia, selalu punya tempat di hati para pecinta kopi. Rasanya yang autentik dan cara penyajiannya yang sederhana bikin kopi ini istimewa.

Tapi, nggak semua orang berhasil bikin kopi tubruk yang pas: nikmat tanpa rasa pahit yang dominan. Yuk, simak rahasia membuat kopi tubruk yang enak!

Rahasia utama kopi tubruk yang nikmat terletak pada kualitas kopinya. Pilih biji kopi segar dengan tingkat roasting sesuai selera, misalnya medium roast untuk rasa yang lebih seimbang.

Jika memungkinkan, giling biji kopi sesaat sebelum menyeduh. Kopi bubuk yang digiling segar cenderung menghasilkan rasa yang lebih kaya.

Kadang, rasa pahit muncul karena takaran kopi dan air yang nggak pas. Untuk hasil optimal, gunakan rasio 1:15, yaitu 1 gram kopi untuk setiap 15 ml air.

Misalnya, untuk segelas kopi 200 ml, gunakan sekitar 13-14 gram kopi bubuk.

Jangan pernah menyeduh kopi dengan air mendidih! Suhu air yang terlalu panas bisa bikin rasa kopi jadi pahit. Gunakan air panas bersuhu 90-96°C.



Kalau nggak punya termometer, diamkan air mendidih selama 30 detik sebelum diseduh.

Menuangkan air ke bubuk kopi juga ada triknya. Tuang air sedikit-sedikit secara perlahan, mulai dari tengah bubuk kopi, lalu gerakkan melingkar.

Teknik ini membantu mengekstraksi rasa kopi secara merata tanpa terlalu banyak mengeluarkan rasa pahit.

Setelah air dituangkan, aduk kopi secara perlahan untuk meratakan ekstraksi. Diamkan selama 2-3 menit agar ampas kopi mengendap. Proses ini bikin kopi lebih bersih saat diminum dan mengurangi rasa pahit yang nggak diinginkan.

Kalau kamu nggak suka kopi pahit, bukan berarti harus mengandalkan gula. Pilih gula aren atau madu jika ingin rasa manis alami tanpa mengurangi aroma kopi. **Nattasya**

TABLOID SinarTani

Sinartani.co.id SINTA TV

**KELUARGA BESAR TABLOID SINAR TANI
MENGUCAPKAN**

Selamat & Sukses

**ATAS TERPILIHNYA KEMBALI
BAPAK IR. SUTARTO ALIMOESO, MM.**

**SEBAGAI KETUA UMUM
PERKUMPULAN PENGGILINGAN PADI DAN PENGUSAHA BERAS INDONESIA (PERPAD)**

PERIODE 2025 - 2030

www.sinartani.co.id www.sinartani.co.id tabloidsinartani.com @SinarTaniST tabloidsinartani SINTA TV SinarTani Sinartani SINTA TV

TABLOID SinarTani
PERTANIAN INDONESIA BARU

**PRICE LIST
BERLANGGANAN**

SINAR TANI CETAK
RP. 16.000 | RP 64.000/BLN
RP 768.000/THN
Per Edisi
Minimum Pembelian

SINAR TANI EPAPER
Rp. 72.000/ Thn

CONTACT
081280312466 - Hasan Latuconsina (Koperasi Perhiptani)
081318273349 - Rita (Koperasi Perhiptani)
081216304232 - Wawan (Sinar Tani)
085921280998 - Asrori (Sinar Tani)

Form:
Nama :
Alamat :
Nomor Whatsapp :
Email :
Jabatan :
No rek : 127.0096.016.587
Bank Mandiri Cabang Ragunan A.n PT. Duta Karya Swasta

sinartani.co.id tabloidsinartani.com @SinarTaniST tabloidsinartani SINTA TV SINTA TV

Pagar Laut, Memagari Hak Masyarakat Pesisir

Pagar sepanjang 30,16 kilometer di pesisir laut Tangerang yang menembus 16 desa di 6 kecamatan kini menjadi heboh. Tak ada yang tahu siapa dibalik pembuatan pagar sepanjang itu. Bahkan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan juga tak mengetahui.

Pagar patok bambu itu sebetulnya sudah dilaporkan dan diketahui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Banten pada Agustus 2024. Saat itu, pagar laut baru terpancang sejauh 7 kilometer. Meski telah diinvestigasi DKP, bahkan melibatkan TNI AL, Polairud Polresta Tangerang, hingga Satpol PP, tapi pagar misterius laut justru bertambah panjang hingga akhirnya mencapai 30 kilometer.

Eli Susiyanti, Kepala DKP Provinsi Banten, menjelaskan bahwa pagar laut tersebut telah menutup akses di wilayah yang meliputi 16 desa di enam kecamatan. Sebab, kawasan ini merupakan zona pemanfaatan umum, termasuk zona perikanan, pelabuhan, hingga waduk lepas pantai yang direncanakan Bappenas.

Di balik masalah ini, menurutnya, ada lebih dari 3.800 nelayan dan 500 pembudidaya yang menggantungkan hidup pada wilayah pesisir tersebut. Investigasi mendalam dilakukan setelah laporan diterima pada Agustus 2024, yang menemukan aktivitas pemagaran masih berlangsung di sepanjang 7 kilometer.

Pada 4-5 September 2024, tim gabungan dari KKP, DKP Banten, dan Polsus PSDKP melakukan investigasi langsung ke lokasi. Berdasarkan temuan awal, tidak ada izin atau rekomendasi dari pihak camat maupun kepala desa terkait pemagaran tersebut. Anehnya, hingga saat itu, belum ada keluhan resmi dari masyarakat. "Pada 18 September 2024, kami kembali melakukan patroli bersama HNSI dan meminta agar aktivitas pemagaran dihentikan," ungkap Eli Susiyanti.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan panjang pagar laut terus bertambah, mencapai 13,12 km saat inspeksi gabungan terakhir, bahkan kini menyentuh 30 km. Eli menegaskan komitmen untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI AL, Polairut, dan PSDKP KKP, dalam menyelesaikan masalah ini. "Pentingnya investigasi lebih lanjut untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan pengelolaan ruang laut," katanya.

Kasus pagar laut itu baru menjadi perhatian setelah foto-fotonya viral di



media sosial. Anehnya lagi, ternyata pagar laut tersebut memiliki HGB (Hak Guna Bangunan). Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) Nusron Wahid mengungkapkan, jumlah HGB yang ada di kawasan pagar laut sebanyak 263 bidang atas nama beberapa perusahaan.

Sebanyak 234 SHGB atas nama PT. Intan Agung Makmur, PT Cahya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Selain itu ada juga SHGB yang dimiliki perseorangan sebanyak 9 bidang, dan Sertifikat Hak Milik sebanyak 17 bidang. Sertifikat HGB maupun hak milik tersebut terbit pada tahun 1982.

Nusron memerintahkan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN untuk memastikan lokasi tersebut. Termasuk berkordinasi dengan Badan Informasi Geospasial untuk memetakan wilayah sesuai sertifikat tersebut.

"Apakah sertifikat bidang tersebut berada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai? Karena kita harus cek dan kita pastikan, karena setelah kami cek dokumennya di dalam proses pengajuan sertifikat tersebut terdapat dokumen-dokumen yang itu terbit tahun 1982," kata dia.

Pengecekan itu akan dilakukan terkait batas garis pantai, baik dari tahun 1982 hingga data terbaru pada tahun 2025 ini. "Untuk mengecek keberadaan, apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang di dalam SHGB maupun SHM tanah tersebut berada di dalam, berada di bawah, di dalam garis pantai atau di luar garis pantai," sambung Nusron.

Tidak Sesuai Aturan

Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan akhirnya ambil langkah tegas. Pemagaran laut sepanjang 30,16 km di Tangerang yang selama ini jadi sorotan bakal segera diselesaikan. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP, Kusdiantoro mengatakan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah prioritas dalam kebijakan ekonomi biru.

Karena itu menurutnya, pemagaran laut mengindikasikan adanya upaya orang untuk mendapatkan hak atas tanah di perairan laut secara tidak benar. Kegiatan tersebut dapat menjadikan pemegang hak berkuasa penuh dalam menguasai, menutup akses publik, privatisasi, merusak keanekaragaman hayati dan berpotensi menyebabkan perubahan fungsi ruang laut.

Selain itu, pemagaran laut tidak sesuai dengan praktek internasional United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). "Paradigma hukum pemanfaatan ruang laut telah berubah menjadi rezim perizinan, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010. Tujuannya adalah memastikan ruang laut tetap menjadi milik bersama yang adil dan terbuka untuk semua," ujar Kusdiantoro.

Sekjen Masyarakat Perikanan Nusantara, Nimmi Zulfaini menyayangkan terjadinya pemagaran laut. Dalam pengelolaan pesisir dan laut menurut Nimmi, pemerintah sudah memiliki Rencana Zona Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZP3K). Jadi,

berdasarkan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, terdapat tiga zona yakni zona perikanan tangkap, budidaya, wisata dan pelabuhan.

"Pemagaran tersebut telah melanggar peraturan yang sudah ada. Kita setuju kalau kemudian ada pembongkaran pagar laut tersebut. Membongkar adalah langkah positif. Sesuai UUD 1945, laut dikuasai negara, sehingga akses terhadap laut sifatnya terbuka," katanya.

Sebagai negara yang wilayah perairannya 70 persennya adalah laut, Nimmi menilai, harusnya pemerintah menerapkan RZP3K dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pemanfaatan wilayah pesisir ketimbang aturan RTRW dari Kementerian ATR/BPN. Karena jika peraturan RTRW yang digunakan justru akan menimbulkan konflik.

"Tentu saja ini menjadi pelajaran bagi kita. Ke depan jangan sampai terjadi kembali. Perlu dipikirkan adalah kewenangan ATR/BPN terkait RTRW dan KKP terkait RZP3K. Selama yang terkait laut, KKP yang mengurus, Kementerian ATR/BPN mengurus yang di darat," tuturnya.

Ke depan Nimmi mengingatkan, pengawasan perlu ditingkatkan kepada pihak yang berniat untuk melanggar peraturan yang ada. Sebab, tidak mudah membongkar pagar yang sudah ada, apalagi telah menyebabkan banyak nelayan yang kesulitan melakukan aktifitas. "Berapa rupiah kerugian negara yang terjadi dengan kegiatan membongkar pagar," tegas alumni FPIK IPB tersebut. **Gsh/Yul**



Lindungi Kepala dengan Helm Serat Tandan Kosong Sawit

Bagi pengendara sepeda motor, helm menjadi salah satu perlengkapan yang wajib digunakan. Jika tidak, maka bakal kena semprit sama Pak Polisi. Bahkan taruhannya adalah kepala bakal babak belur apabila terjadi kecelakaan.

Kini ada inovasi bahan helm yang diperkenalkan peneliti dari IPB University, Dr Siti Nikmatin. Di tangan Dosen Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB University, Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) berubah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi.

Nikmatin memanfaatkan *lignoselulosa* yang terkandung dalam TKKS dan diolah menjadi serat berukuran mikropartikel sebagai penguat polimer untuk bahan baku tambahan pembuatan helm ramah lingkungan (*green composite*).

Hingga tahun 2018, Nikmatin sudah memproduksi helm full face, helm half face, helm anak dan helm sepeda dari serat limbah TKKS. Tak berhenti di sini, ia terus melakukan pengembangan dengan menambahkan teknologi *flame*

retardant untuk mendapatkan serat TKKS yang memiliki ketahanan panas lebih tinggi. Teknologi ini menjadi pengganti penggunaan *compatibilizer (coupling agent)* yang selama ini masih impor.

Helm ini berbahan dasar limbah Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS). Limbah TKKS diolah menjadi serat dengan berbagai macam ukuran (panjang, pendek, mikro dan nano). Serat ini menjadi bahan baku filler (penguat) polimer ABS dalam pembuatan helm. Selain dimanfaatkan untuk membuat helm, Nikmatin juga sedang mengembangkan *sheet* bahan anti peluru dan komponen otomotif dari limbah TKKS.

Menurut Nikmatin, serat dalam helm ini berfungsi untuk menyerap tumbukan yang terjadi ketika terjadi kecelakaan. Harapannya, energi tumbukan ini tidak langsung

mengenai kepala pengguna, namun diserap serat terlebih dahulu, sehingga energi kinetik setelah tumbukan kecil dan kepala lebih terlindungi.

Produksi helm sepeda dan motor dari bahan ramah lingkungan yang telah mendapatkan berbagai penghargaan dan telah lolos pengujian Standar Nasional Indonesia (SNI) ini memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 71,21 persen. Bahkan inovasi pemanfaatan serat TKKS menjadi bahan baku material helm ini telah dipatenkan dengan nomor P00201609159.

Ada beberapa keunggulan helm dari TKKS ini. Pertama, mampu menyerap energi kinetik tumbukan sehingga kepala pengguna lebih terlindungi. Kedua, memanfaatkan limbah kelapa sawit sehingga mengurangi masalah sampah.

"Helm ini pun lebih ringan dari helm yang beredar di pasaran, karena penggunaan serat TKKS yang memiliki densitas rendah menyebabkan helm menjadi ringan," ujarnya seperti dikutip dari *alumniipbpedia*.

Dengan inovasi, Nikmatin berhasil mendapatkan Anugerah Inovasi, Prakarsa dan Pelopor Pemberdayaan Masyarakat Jawa Barat 2016. GC helmet sendiri juga memperoleh penghargaan 108 Inovasi Indonesia 2016 dari Business Innovation Centre (BIC) kategori material maju, juara 1 Gelar Inovasi Daerah Kabupaten Bogor 2017 dan 10 Startup Unggulan Terobosan Inovasi Indonesia 2017 Kemenristekdikti. Selain itu, GC helmet juga menjadi helm inovasi pertama di Indonesia dan telah memenuhi standar SNI juga ASTM.

Yul

Komersialisasi E-PAPER Sinartani

TABLOID Sinartani

Tabloid sinartani.com

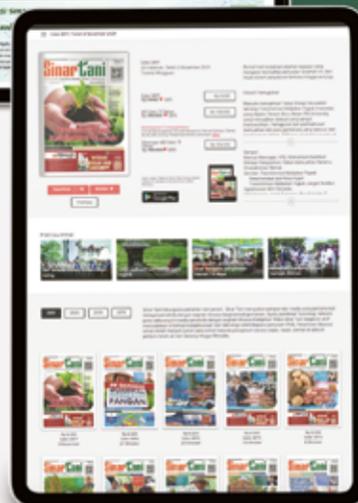
SINTA TV

E-paper Sinartani sudah berjalan selama 2 tahun dan memberikan informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan Sinartani versi cetak. E-paper Sinartani terbit tiap minggu, 48 kali setahun, terdiri dari 20-24 halaman sekali terbit. Informasinya mencakup issue-issue yang lebih melebar, selain pertanian juga mencakup informasi umum dan humaniora.

Sampai saat ini e-Paper Sinartani masih didistribusikan secara gratis ke semua penyuluh. Kini, waktunya E-Paper yang sudah dikenal oleh penyuluh dan petani itu mulai dijual secara komersial dengan harga yang teramat murah, yaitu Rp 1.500/edisi atau Rp 72.000/tahun.

Mudah-mudahan upaya ini merupakan sinergi yang baik antara pembaca dengan penerbit Sinartani yang tidak henti-hentinya berupaya meningkatkan kualitas Sinartani agar lebih bermanfaat dan sekaligus memberi bahan bacaan yang baik bagi pembacanya.

Para pembaca yang ingin berlangganan dipersilahkan mengirimkan nama dan nomor HP-nya, melalui WhatsApp ke Sdr Wawan (081216304232) serta mentransfer biaya tahunan sebesar Rp 72.000 ke Rekening Sinartani: Bank Mandiri Cab. Ragunan No. 127.0096.016.413



BERLANGGANAN

E-paper Tabloid Sinartani

Hanya dengan
Rp. 72.000 / Tahun

HUBUNGI :
0813 1757 5066

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut

KAMI MENJANGKAU LEBIH LUAS

Mentan Nikmati Jagung Bakar, Wamentan Mengenang Masa SMA

Pekan lalu, dua pejabat Kementerian Pertanian melakukan kegiatan unik. Di Maros, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di sela kunjungan kerjanya di Sulawesi Selatan secara khusus membeli jagung petani seluas 1 ha. Sedangkan Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono berkunjung ke almamaternya, SMA Taruna Nusantara di Magelang.

Saat di Maros, Mentan mengajak masyarakat sekitar untuk menikmati jagung bakar bersama di Desa Samangki, Kecamatan Simbang. Hamparan kebun jagung yang luas ini diperkirakan produksinya 5 ton. Kegiatan ini dihadiri sejumlah pejabat, seperti Bupati Maros, Penjabat (Pj.) Bupati Luwu, Bupati Gowa, Dandim, Kapolres, Camat, Kapolsek, Danramil, Sekjen IKA Unhas, hingga Tim Ahli Menteri (TAM).

Berlokasi strategis di pinggir jalan, acara ini menghadirkan suasana akrab dengan sajian jagung bakar dan rebus yang langsung diolah di tempat, hasil dari panen petani lokal. Lahan jagung yang terhampar hijau tepat di depan tenda acara menjadi

bukti keberhasilan budidaya jagung di wilayah ini.

Dalam dialognya bersama masyarakat, Mentan Amran menyampaikan pentingnya memanfaatkan hasil produksi jagung untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung ketahanan pangan nasional. "Kegiatan ini bukan hanya untuk silaturahmi, tetapi juga bagian dari kampanye pentingnya mengoptimalkan potensi pertanian lokal. Jagung adalah salah satu komoditas unggulan yang mendukung target swasembada pangan kita," ujarnya.

Mentan Amran juga menyoroti potensi besar jagung dalam menopang ketahanan pangan Indonesia. Dengan peningkatan produksi jagung, Indonesia tidak



hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri tetapi juga berpotensi menjadi pemain utama di pasar global.

Pada kesempatan tersebut, Amran juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut menjaga kelestarian jagung pulut lokal, yang tidak hanya memiliki rasa manis dan tekstur yang lezat, tetapi juga menjadi bagian penting dari kekayaan pangan nusantara. Jagung pulut lokal, yang kaya akan kandungan nutrisi, memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan pangan serta menjadi warisan yang harus dilestarikan agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, mengenang masa-masa penuh kesan selama menempuh pendidikan di SMA Taruna Nusantara saat menghadiri pelantikan kepala sekolah baru sekolah tersebut di Magelang, Jawa Tengah, Rabu (15/1).

Acara juga dihadiri Menteri Luar Negeri Sugiono, Mensesneg Prasetyo Hadi, serta sejumlah pejabat lainnya yang merupakan bagian dari

kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sudaryono menyampaikan, betapa besar peran SMA Taruna Nusantara dalam membentuk karakter dan nilai-nilai kepemimpinan yang menjadi bekalnya hingga saat ini.

"Taruna Nusantara bukan hanya tempat belajar, tetapi juga kawah candradimuka bagi kami yang ingin mengabdikan diri untuk negeri. Nilai-nilai integritas, disiplin, dan kebersamaan yang ditanamkan sejak dulu tetap menjadi pedoman saya hingga kini," ujar Sudaryono yang merupakan alumni angkatan ke-11 sekolah tersebut.

Acara ini juga menjadi ajang nostalgia bagi Sudaryono dan para pengajar untuk berbagi cerita tentang perjuangan mereka saat menjalani pendidikan yang ketat di lingkungan sekolah berasrama tersebut. "Sekolah ini membuktikan bahwa dengan pendidikan yang berorientasi pada karakter, kita bisa menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bermental tangguh dan berjiwa nasionalis," ungkapnya. **Yul**



Sutarto Alimoeso Kembali Pimpin Perpadi

Mentan Direktur Utama Perum Bulog, Sutarto Alimoeso terpilih kembali menjadi Ketua Umum DPP Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras (PERPADI) Masa Bakti 2025-2030. Hasil ini diputuskan seluruh peserta Musyawarah Nasional PERPADI Ke-VI di Surakarta, Kamis (16/1).

Jalannya rangkaian sidang Munas Perpadi dipimpin oleh Midi Iswanto (DPD Lampung), Nellys Soekidi (DPD DKI Jakarta), dan Nur Iswan (DPP). Ketetapan Munas yang lain adalah rekomendasi strategis yang terkait dengan Penataan/Penguatan Struktur organisasi hingga rekomendasi kebijakan dalam mendukung program prioritas Pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan terutama Beras.

Usai terpilih kembali, Sutarto menyampaikan terima kasih dan bersyukur atas amanah yang diem-



bankan. Ia bertekad untuk memperkuat organisasi Perpadi dan membantu menyuarakan aspirasi anggotanya.

"Sinergi antara semua pemangku kepentingan dalam ekosistem

beras nasional harus menjadi komitmen bersama. Terutama dalam upaya mewujudkan swasembada beras. Ingat, Indonesia pernah mencapainya," kata Sutarto yang juga pernah menjadi Dirjen Tanaman

Pangan di era Presiden SBY.

Selain itu, lanjut Sutarto, untuk swasembada maka diperlukan penguatan sektor ini secara komprehensif sejak dari hulu sampai hilir. Salah satunya adalah dengan merevitalisasi penggilingan padi. "Kebijakan pemerintah yang tepat di on-farm juga mutlak diperlukan seperti ketersediaan benih, pupuk dan air sehingga produktivitasnya meningkat. Saat ini produktivitas hasil panen kita kan rata-rata baru 5,3 ton/ha," tegasnya.

Munas PERPADI ke-VI diselenggarakan pada 14-16 Januari 2024. Dihadiri lebih dari 1500 peserta dan peninjau dari lebih dari 20 perwakilan DPD Provinsi dan ratusan DPC Kabupaten/Kota. Rangkaian Munas dibuka dan dihadiri Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, Dirut BULOG, Satgas Pangan Pusat, Bank Himbara dan pemangku kepentingan lainnya. **Yul**

Greenhouse Melon Desa Kwarasan, Tempat Belajar Kepala Dusun

Sekilas greenhouse ukuran 9 x 23 meter yang berdiri di tepi jalan Desa Kwarasan, kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang terlihat biasa saja. *Greenhouse* ini ditanami melon dengan sistem Dutch Bucket. Dilengkapi dengan drum besar sebagai tempat cadangan dan mencampur nutrisi AB MIX. Adapula sensor untuk mengatur penyaluran nutrisi dengan sistem tetes (drip irrigation) dengan timer yang dapat dioperasikan melalui handphone.

Namun ketika kita masuk kedalam kebun, bagi seseorang yang telah terbiasa dengan budidaya melon dalam *greenhouse* akan segera melihat beberapa kejanggalan. Keanehan yang pertama adalah dalam 1 kebun, yang berisi 684 polybag, ditanam 5 varietas melon unggul. Ada varietas Apollo, Sweet Hami, Honey Hami, Sweet Net 9 Dan Queen Orange. Tiap varietas ditanam pada 2 baris tanaman.

Keanehan kedua adalah buah tumbuh tidak seragam pada ketinggian yang sama. Biasanya buah melon dibuahkan, dengan polinasi, pada daun kesembilan. Sehingga buah melon dapat tumbuh pada ketinggian yang sama. Tapi di kebun ini terlihat ada buah yang tumbuh jauh lebih tinggi, meski sebagian besar tetap di daun ke 9.

Menurut Zainal Afandi (43), Kepala Dusun Kalangan, Desa Kwarasan, penanggung jawab kebun melon di *greenhouse* tersebut, kondisi kebun yang semacam itu memang disengaja. "*Greenhouse* ini memang sedang dijadikan tempat pembelajaran budidaya melon bagi

para kepala dusun dan perangkat dusun se Desa Kwarasan," katanya.

Zainal berharap setelah belajar selama 1-2 musim tanam, mereka dapat mengembangkan di dusun atau tempat masing-masing. Dengan menanam berbagai varietas dalam satu kebun, dimaksudkan agar pengunjung dapat menyaksikan sendiri varietas yang paling cocok yaitu varietas yang mempunyai produktivitas bagus dan disukai konsumen.

"Kalau buah yang kurang seragam tersebut diakibatkan karena para peserta belum terlatih dalam melakukan polinasi. Sehingga banyak gagal, kemudian naik ke bunga berikut, naik lagi sampai berhasil di bunga yang paling atas," kata Zainal.

Sebagai salah seorang kepala dusun, Zainal dipercaya sebagai mentor oleh Kepala Desa Kwarasan, M.Tamim. Sebab, sebelum menjadi kepala dusun, ia bekerja di perkebunan buah. Bahkan sempat berpindah-pindah tempat, misalnya di Bandungan, Sumowono, Malang dan Bali. Semuanya di kebun melon. Setelah melanglang buana, Zainal kembali ke kampung halaman dan dipercaya menjadi kepala dusun.



Camat Jambu,
Sukamdi

Dana Desa

Dengan potensi SDM seperti Zainal yang ahli dalam budidaya melon, Kepala Desa Kwarasan, M. Tamim kemudian memutuskan untuk mengembangkan buah melon prima sebagai komoditas unggulan Desa Kwarasan, ia kemudian dipercaya memanfaatkan dana Desa. "Kami memanfaatkan dana Ketahanan Pangan yang bersumber dari 20% dana desa untuk pengembangan melon prima," kata Tamim.

Pemilihan melon menurut Tamim yang juga Ketua Kelompok Tani Desa Kwarasan, karena pertimbangan budidaya buah tersebut memenuhi persyaratan tujuan ketahanan pangan desa seperti yang tersirat dalam Kepmendesa No. 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa.

Dalam Kepmendesa No. 82 Tahun 2022 menyebutkan ketahanan pangan desa harus memenuhi kriteria. Pertama, meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat Desa maupun dari lumbung pangan Desa. Kedua, meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat Desa. Ketiga, meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal.

"Kami pernah juga mencoba Budidaya Magot tetapi kurang

berkembang. Kemudian kami mencoba budidaya melon dalam *greenhouse* yang dilaksanakan Zainal sebagai Kepala Dusun Kalangan," katanya.

Ternyata uji coba pertama cukup berhasil, bahkan hasil panen melon kebanjiran pembeli. Dengan permintaan yang cukup tinggi tersebut, Pemerintah Desa Kwarasan tahun ini berencana membangun sebuah *greenhouse* lagi. "Kedepan setiap perangkat Desa Kwarasan harus mampu berbudidaya melon dalam *greenhouse* di wilayah kerjanya dan mampu menjadi mentor bagi warganya," harapannya.

Para perangkat desa dijadwal dua hari sekali ke kebun *greenhouse* untuk pengamatan dan pemeliharaan rutin. Namun pada waktu tertentu, misalnya saat Polinasi, semua perangkat desa wajib datang untuk menerima pelatihan dan langsung mempraktekkan.

Sementara itu, Imam Widhihantoro, Penyuluh Pertanian Koordinator BPP Jambu mengakui, budidaya melon di Desa Kwarasan menjadi model pemberdayaan masyarakat dalam Ketahanan Pangan. Sebagai pendamping petani, ia mengakui, sangat terbantu dengan adanya kegiatan ketahanan pangan desa semacam ini.

"Pemberdayaan masyarakat dengan cara belajar sambil bekerja atau sering diistilahkan *learning by doing* merupakan model pembelajaran yang sangat efektif. Peserta pelatihan juga dapat menyerap materi pembelajaran dan mengingat lebih banyak karena telah mempraktekkan," kata Imam.

Camat Jambu, Sukamdi mengatakan, Kecamatan Jambu merupakan daerah agraris. Program Ketahanan Pangan Desa dialokasikan sebesar 15 - 20% dari dana desa sesuai dengan potensi wilayah masing-masing. Karena itu, pelaksanaan kegiatan Ketahanan Pangan Desa dapat dikolaborasi dengan kelompok tani, Gapoktan, KUB, BUMDes dan BUMDesMa, sehingga akan mempunyai kekuatan permodalan dan posisi tawar yang kuat.

Sukamdi optimis, dengan pengelolaan yang baik dana untuk ketahanan pangan di desa dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya secara efektif dan efisien. Harapannya ke depan akan muncul komoditas unggulan daerah, yang akan mendukung kesejahteraan petani dan masyarakat luas.

Djoko W/Herman

